



**SIMBOL KEBUDAYAAN PEREMPUAN DALAM  
PERINGATAN HARI KARTINI DI SURABAYA TAHUN 1950-  
1965**

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana  
pada program studi pendidikan sejarah*

**SKRIPSI**

Oleh

**Fandi Achmad Fahrezi  
220210302064**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PENDIDIKAN SEJARAH  
JEMBER  
2026**

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menuntaskan penyusunan skripsi mengenai simbol kebudayaan perempuan dalam peringatan hari kartini di surabaya tahun 1950- 1965. Karya ilmiah ini disusun sebagai prasyarat wajib guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Skripsi ini peneliti persembahkan dengan tulus kepada seluruh pihak yang terus menggaungkan semangat perjuangan perempuan yang terinspirasi dari tulisan atau karya-karya ibu Kartini.



**MOTTO**

“Terus berenang, lanjutlah mendaki.”<sup>1</sup>

Perunggu



---

<sup>1</sup> Lagu dari band Perunggu dengan judul 33x

## PERNYATAAN ORISINALITAS

iv

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fandi Achmad Fahrezi

NIM : 220210302064

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *Simbol Kebudayaan Perempuan Dalam Peringatan Hari Kartini Di Surabaya Tahun 1950-1965* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 April 2026

Yang menyatakan,



Fandi Achmad Fahrezi

NIM 220210302064

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi berjudul *Simbol Kebudayaan Perempuan Dalam Peringatan Hari Kartini Di Surabaya Tahun 1950- 1965* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas KePendidikan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada:

Hari :

Tanggal :

Tempat : Fakultas KePendidikan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

**Pembimbing**

1. Pembimbing Utama

Nama : Drs. Kayan Swastika, M.Si

NIP : 196702102002121002

**Tanda Tangan**

(.....)

**Penguji**

1. Penguji Utama

Nama : Robit Nurul Jamil, M.P.d.

NIP : 1993011222023211015

2. Penguji Anggota

Nama : Gusti Ngurah Ary Kesuma Puj S.S, M.A

NIP : 199201142022031008

(.....)

(.....)

## **SIMBOL KEBUDAYAAN PEREMPUAN DALAM PERINGATAN HARI KARTINI DI SURABAYA TAHUN 1950- 1965**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi makna perempuan dalam konteks sejarah dan budaya Indonesia dengan menempatkan figur R.A. Kartini sebagai titik tolak kajian. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana representasi perempuan, simbol budaya seperti kebaya, serta dinamika sosial-politik di kota Surabaya membentuk pemaknaan terhadap identitas perempuan dari masa kolonial hingga pascakemerdekaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis dan analisis budaya. Sumber data diperoleh dari arsip, literatur akademik, serta dokumen sejarah yang relevan. Teknik analisis dilakukan melalui interpretasi kritis terhadap teks dan konteks sosial yang melingkupinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa figur Kartini tidak hanya diproduksi sebagai simbol emansipasi perempuan, tetapi juga mengalami proses konstruksi ulang melalui media, kebijakan negara, dan praktik budaya. Kebaya sebagai simbol identitas perempuan turut mengalami transformasi makna, dari simbol tradisional menjadi representasi politik dan kultural. Selain itu, Surabaya sebagai ruang sosial memperlihatkan dinamika yang kompleks dalam membentuk narasi perempuan, terutama dalam kaitannya dengan nasionalisme, modernitas, dan identitas lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa identitas perempuan di Indonesia bersifat dinamis dan terus mengalami negosiasi antara tradisi, kekuasaan, dan modernitas.

**Kata kunci:** Kartini, perempuan, kebaya, Surabaya, sejarah budaya

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the construction of women's meaning within the historical and cultural context of Indonesia by positioning R.A. Kartini as the central figure of analysis. The research focuses on how women's representations, cultural symbols such as kebaya, and socio-political dynamics in Surabaya shape the understanding of women's identity from the colonial to the post-independence period. This research employs a qualitative approach using historical methods and cultural analysis. Data sources include archives, academic literature, and relevant historical documents. The analysis is conducted through critical interpretation of texts and their socio-cultural contexts. The findings reveal that Kartini is not only constructed as a symbol of women's emancipation but also continuously reinterpreted through media, state policies, and cultural practices. Kebaya, as a symbol of female identity, has undergone a transformation of meaning, from a traditional garment to a political and cultural representation. Furthermore, Surabaya as a social space demonstrates complex dynamics in shaping women's narratives, particularly in relation to nationalism, modernity, and local identity. This study concludes that women's identity in Indonesia is dynamic and continuously negotiated between tradition, power, and modernity.*

**Keywords:** *Kartini, women, kebaya, Surabaya, cultural history*

## RINGKASAN

Penelitian ini berangkat dari persoalan bagaimana identitas perempuan dalam sejarah Indonesia tidak hadir sebagai sesuatu yang tetap, melainkan dibentuk melalui proses sosial, budaya, dan politik yang terus berubah. Figur R.A. Kartini sering ditempatkan sebagai simbol emansipasi perempuan, namun dalam praktiknya representasi tersebut mengalami penyederhanaan dan bahkan instrumentalisasi oleh berbagai kepentingan, terutama negara dan wacana dominan. Di sisi lain, simbol budaya seperti kebaya turut berperan dalam membentuk citra perempuan ideal, yang tidak jarang mengandung nilai-nilai normatif tertentu. Dalam konteks ini, kota Surabaya dipilih sebagai ruang kajian karena memiliki dinamika historis yang kuat dalam membentuk narasi nasionalisme, modernitas, serta peran perempuan di ruang publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis dan analisis budaya. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelusuran dokumen sejarah, termasuk arsip, karya ilmiah, serta sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Analisis dilakukan dengan pendekatan interpretatif-kritis, yang tidak hanya membaca teks secara deskriptif, tetapi juga menempatkannya dalam konteks sosial dan kekuasaan yang melingkupinya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana makna perempuan dikonstruksi, direproduksi, dan dinegosiasikan dalam berbagai periode sejarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi Kartini sebagai simbol perempuan Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan mengalami transformasi sesuai dengan konteks zamannya. Dalam beberapa periode, Kartini dikonstruksi sebagai figur emansipatif, sementara pada periode lain direduksi menjadi simbol perempuan ideal yang sesuai dengan norma domestik. Hal ini menunjukkan adanya relasi erat antara wacana perempuan dengan kepentingan ideologis dan politik.

Selain itu, kebaya sebagai simbol budaya perempuan juga mengalami pergeseran makna. Tidak hanya sebagai pakaian tradisional, kebaya menjadi representasi identitas sosial dan kultural yang sering dikaitkan dengan nilai

kesopanan, keanggunan, dan nasionalisme. Dalam praktiknya, simbol ini turut digunakan untuk membentuk standar perempuan ideal dalam masyarakat.

Dalam konteks Surabaya, dinamika sejarah kota ini memperlihatkan bagaimana perempuan hadir dalam ruang sosial yang kompleks, baik sebagai subjek yang aktif maupun sebagai objek representasi. Peran perempuan dalam narasi sejarah lokal menunjukkan adanya interaksi antara modernitas, tradisi, dan kekuasaan dalam membentuk identitas mereka.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa identitas perempuan di Indonesia merupakan hasil konstruksi historis yang dinamis. Pemaknaan terhadap perempuan, baik melalui figur Kartini maupun simbol budaya seperti kebaya, tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perempuan perlu ditempatkan dalam kerangka yang kritis dan kontekstual, bukan sebagai sesuatu yang bersifat tetap dan universal

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Simbol Kebudayaan Perempuan Dalam Peringatan Hari Kartini Di Surabaya Tahun 1950- 1965”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Dr. Mohammad Na'im, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Akhmad Ryan Pratama, S.Hum., M.A. selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
4. Drs. Kayan Swastika, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan dengan penuh tanggung jawab selama proses penyusunan tugas akhir;
5. Robit Nurul Jamil, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Penguji Utama dan Gusti Ngurah Ary Kesuma Puja S.S, M.A selaku Dosen penguji Anggota, yang telah memberikan saran, masukan dan kritik yang membangun kepada tugas akhir yang penulis susun;
6. Bapak dan Ibu dosen program studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing selama poses perkuliahan untuk menyelesaikan studi di Universitas Jember;
7. Ibu Kartini tercinta, perempuan hebat yang telah menginspirasi dan menjadi inspirasi dalam kepenulisan skripsi ini.

”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup.....	9
1.6 Tinjauan Pustaka.....	13
1.7 Kerangka Konseptual.....	18
1.8 Metode Penelitian.....	21
1.9 Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB 2. BENTUK DAN PELAKSANAAN PERINGATAN HARI KARTINI DI SURABAYA (1950-1965)</b> .....	<b>26</b>
2.1 Konteks Historis Surabaya Pasca-Kemerdekaan.....	26
2.2 Dinamika Sosial dan Politik Perempuan.....	31
2.3 Ragam Aktivitas dalam Peringatan Hari Kartini.....	35
<b>BAB 3 KONSTRUKSI SIMBOL KEBUDAYAAN PEREMPUAN DALAM PERINGATAN HARI KARTINI (1950-1965)</b> .....	<b>42</b>
3.1 Representasi Kartini dalam Simbol dan Upacara.....	42
3.2 Symbolisme Busana dan Tarian.....	46
3.3 Perempuan sebagai Subjek dan Objek Simbol.....	50
<b>BAB IV</b> .....	<b>53</b>

**MAKNA DAN KEPENTINGAN IDEOLOGIS DI BALIK PERINGATAN HARI KARTINI (1950-1965) .....53**

    4.1 Kartini dan Politik Identitas Nasional.....53

    4.2 Perayaan Hari Kartini sebagai Alat Negara.....56

    4.3 Pertarungan Makna Kartini antar Kelompok Sosial .....60

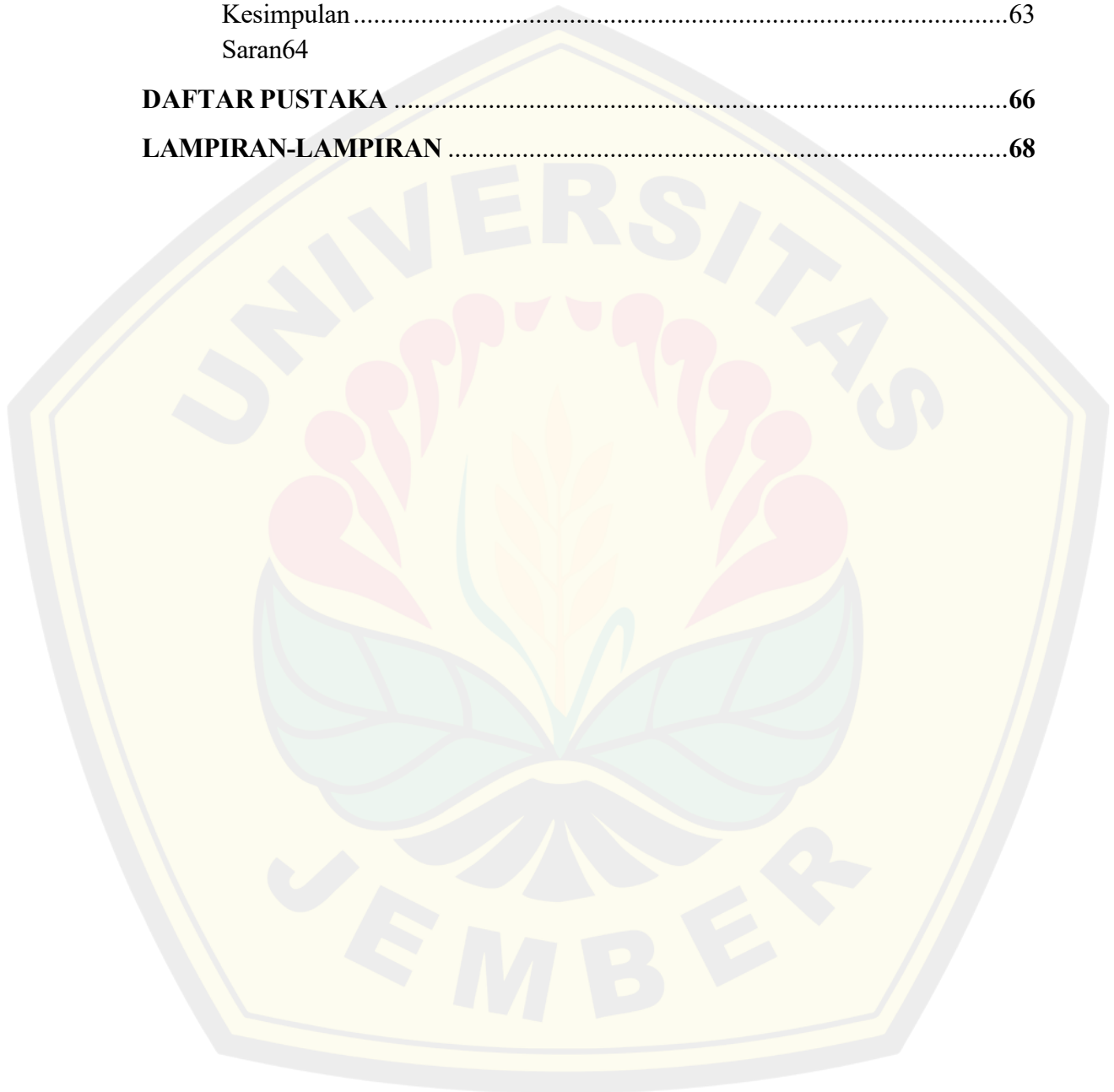
**V. PENUTUP .....63**

    Kesimpulan .....63

    Saran64

**DAFTAR PUSTAKA .....66**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....68**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Ringkasan Tafsir Clifford Gertz.....	53
Tabel 4.1 Perbedaan Tafsir Hari Kartini .....	71



## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1,1 Kerangka Berpikir..... 34
2. Gambar 1.2 Statistik Distribusi..... 39
3. Gambar 2.2 Slogan Rotterdam Harian Rakjat Soerabaja ..... 43
4. Gambar 2.3 Jurnal Perdagangan Umum, Jawa Timur mendukung Soekarno, 1955 ..... 44
5. Gambar 2.4 Seorang pemimpin/pejabat sedang berpidato pada Kongres Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya dengan berlatar belakang bendera partai PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia adalah salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia. 8 - 9 - 1954, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur ..... 45
6. Gambar 2.5 Ganyang Malaysia Inisiasi PKI..... 45
7. Gambar 2.6 Acara karnaval pada peringatan hari kartini di Surabaya, 21 - 4 - 1953, Gerak jalan kontingen wanita pada peringatan Hari Kartini di Surabaya 21 - 4 - 1953 ..... 47
8. Gambar 2.7 Rangkaian Kegiatan Hari Kartini Hiburan Anak dan Arena Bermain: Peringatan Hari Kartini di Surabaya. 21 April 1957. Lomba menghias makanan, Peringatan Hari Kartini di Surabaya. 21 April 1957. Arena bermain anak-anak, Lomba Anak - anak berpakaian profesi berpakaian kelinci, Peringatan Hari Kartini di Surabaya. 21 April 1957. Lomba sepeda hias Anak - anak, Peringatan Hari Kartini di Surabaya. 21 April 1957. Anak - anak berpakaian profesi, Peringatan Hari Kartini di Surabaya. 21 April 1957. Lomba Anak - anak berpakaian profesi berpakaian penjual sate madura..... 48
9. Gambar 2.8 Ragam Seni dan Pertunjukan di Hari Kartini: Tari-tarian janger surabaya yang dibawakan oleh anak-anak sekolah pada acara peringatan hari kartini di surabaya, 21 - 4 - 1953, Seperangkan gamelan sedang dimainkan oleh para NIYAGA pada peringatan hari kartini di Surabaya, 21 - 4 - 1953, Pertunjukan wayang Potehy, Peringatan Hari Kartini di Surabaya. 21 April 1957, Pameran kerajinan tangan dalam peringatan hari kartini di Surabaya, 21 - 4 - 1953, Pameran lukisan dalam peringatan hari kartini di Surabaya, 21 - 4 - 1953 ..... 50
10. Gambar 2.9 Ketua Rukun Wanita Kapanewon Tempel, Ibu Panewu sedang membuka acara dalam rangka Peringatan Hari Kartini dan Sekelompok pemudi sedang menyanyi-kan Lagu Ibu Kita Kartini dalam acara Peringatan Hari Kartini 21 April 1957 di Yogyakarta ..... 42
11. Gambar 2.10 Suasana exposisi kerajinan tangan pada waktu acara Peringatan Hari Kartini, tampak para ibu-ibu sangat antusias mengikutinya dan Para pengurus dan anggota Rukun Wanita Kapanewon Tempel foto bersama di depan Pendopo Kapanewon Tempel usai Peringatan Hari Kartini di Yogyakarta 21 April 1957...44
12. Gambar 2.11 Kartini-day in Bandung 1953..... 45
13. Gambar 3.1 De vrije pers : ochtendbulletin, De Vrije Pers, Soerabaia 21 April 1949, <https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Kartini+Soerabaja&coll=d>

dd&ide

ntifier=ddd:011210111:mpeg21:a0035&resultsidentifier=ddd:011210111:

mpeg21 ..... 59



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Raden Ajeng Kartini kerap mendapat julukan sebagai pionir gerakan perempuan Indonesia, pejuang pendidikan dan pahlawan perempuan. Berdasarkan Putusan Presiden Republik Indonesia no. 108 tahun 1964 Kartini ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional.<sup>2</sup> Oleh karena itu, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini dan menjadi satu-satunya pahlawan yang memiliki hari peringatannya sendiri, berbeda dengan pahlawan lain yang secara umum diperingati pada Hari Pahlawan, yakni pada tanggal 10 November.

Namun, sebenarnya Peringatan Hari Kartini telah berlangsung sejak masa kolonial, menandai momen reflektif yang dirayakan dengan beragam cara sesuai dengan ciri khas zamannya. Sekitar dekade 1930-an, semangat memperingati Kartini tumbuh dari inisiatif para perempuan sendiri. Mereka menggelar pertemuan pada malam hari, dalam suasana yang penuh kekhidmatan<sup>3</sup>. Meskipun tak selalu besar, acara ini cukup mendapat sorotan, bahkan sempat dimuat secara singkat di surat kabar berbahasa Belanda, *De Locomotief*. Isi acara pada umumnya berupa pidato yang mengangkat sosok dan pemikiran Kartini, kadang diselingi dengan pertunjukan seni tradisional seperti wayang dan tari yang menambah nuansa budaya dalam peringatan tersebut. Di beberapa tempat, Hari Kartini menjadi momentum penting untuk melahirkan organisasi perempuan. Salah satu contohnya adalah berdirinya perkumpulan kaum ibu di Binjai yang diberi nama Semangat Boenda, tepat pada tanggal 21 April 1939. Kendatipun demikian, peringatan terhadap sosok R.A. Kartini telah mulai dikenal secara luas di berbagai kalangan. Salah satu momen penting .

---

<sup>2</sup> Keppres No. 108 Tahun 1964,” n.d., diakses pada 8 Juni, 2023, <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/13148/kp1081964.pdf>

<sup>3</sup> Mahy, P. (2012). *Being Kartini: Ceremony and print media in the commemoration of Indonesia's first femini*. *Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context*, 28, 1-11.”

Tercatat pada tahun 1929, ketika perayaan Hari Kartini ternyata tidak hanya diselenggarakan oleh sekolah Van Deventer di Solo sebagai peringatan lima puluh tahun kelahiran beliau.<sup>4</sup> Kata Van Deventer diambil dari nama belakang Conrad Theodore Van Deventer, pendiri yayasan sosial Kartini Fonds.<sup>5</sup> Namun, berdasarkan penelusuran dengan menggunakan kata kunci Kartini dalam artikel-artikel koran koleksi delpher.nl di rentang tahun 1927smpai 1940, ditemukan bahwa pada tahun 1929, perayaan Kartini tidak hanya diadakan oleh sekolah Van Deventer.

Disisi lain, liputan tentang peringatan Hari Kartini sendiri pertama kali ditulis dalam surat kabar *Soerabaijasch handelsblad* yang terbit pada 3 April 1929 dan ditulis dalam bentuk artikel pendek berjudul “*Een herdenking*” (Sebuah Peringatan) yang dimuat di surat kabar *Soerabaijasch Handelsblad* pada tanggal 3 April 1929.<sup>6</sup> Artikel tersebut melaporkan bahwa penyelenggaraan perayaan Hari Kartini merupakan inisiatif dari bagian keputrian organisasi kepanduan Jong Java (*Jong Java-padvinderij*). Rencana kegiatan peringatan tersebut meliputi penyelenggaraan pesta dan pawai, yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21 April. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 5 April 1929, surat kabar *De Koerier* yang terbit di Bandung menanggapi berita tersebut dengan menambahkan bahwa peringatan kali ini memiliki makna istimewa, karena bertepatan dengan peringatan 50 tahun kelahiran R.A. Kartini.

Selain itu, surat kabar *De Locomotief* yang terbit di Semarang juga menerbitkan laporan bertajuk “*R.A. Kartini herdacht*” (Mengenang R.A.Kartini). Dalam laporannya, disebutkan bahwa inisiatif untuk memperingati ulang tahun Kartini yang ke-50 juga datang dari bagian keputrian pramuka Jong Java. Kegiatan tersebut dirancang untuk dilaksanakan secara meriah, dengan melibatkan pramuka perempuan serta perwakilan dari berbagai organisasi perempuan yang turut bergabung sebagai panitia penyelenggara.

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Een herdenking, *Soerabaijasch handelsblad* (Surabaya, 3 April, 1929).

Selanjutnya di Surabaya, pada 21 April 1929 peringatan hari Kartini dilaksanakan di stadion dan dihadiri oleh Bupati Surabaya, R. A. Nitiadiningrat dan wakil Gubernur Jawa Timur, Mr. Soebroto.<sup>7</sup>

Lalu, berdasarkan penelusuran di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa timur ditemukan beberapa arsip foto perayaan hari kartini. Dari foto-foto tersebut diketahui pada tahun 1958-1964 perayaan Hari Kartini diadakan secara meriah dan kreatif karena bentuk perayaannya meliputi pentas seni, diskusi perempuan dan penampilan dari kaum perempuan untuk membaca puisi atau menyanyi.

Perjuangan Raden Ajeng Kartini terekam dalam surat-suratnya yang kemudian dihimpun menjadi sebuah buku yang berjudul *Door Duisternis tot Licht* dan diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang oleh J.H. Abendanon.<sup>8</sup> Buku tersebut menggambarkan kondisi perempuan Indonesia yang ingin menaikkan derajat kaumnya dengan cara memberikan pendidikan kepada anak-anak dan perempuan bangsanya. Sebab, pendidikan yang layak pada kala itu cenderung didapatkan oleh bangsa Belanda, Barat dan Priyai-priyai pribumi dan rakyat biasa cenderung tidak mendapatkan fasilitas atau pengajaran yang semestinya. Sehingga, hal tersebut berdampak pada anak-anak pribumi, terutama Banyak dari mereka tumbuh dalam bayang-bayang keterbatasan, tanpa akses terhadap ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi hak setiap insan perempuan yang kerap terabaikan dalam sistem pendidikan kolonial.<sup>9</sup> Sejak usia dini, anak perempuan diajarkan bahwa tempat mereka hanyalah di dapur, di sumur, dan di kasur. Mereka dipersiapkan bukan untuk berpikir kritis atau belajar mandiri, melainkan untuk patuh, tunduk, dan mengabdikan. Akibatnya, potensi besar yang mereka miliki terkubur sebelum sempat berkembang. Kemudian, hal tersebut juga memiliki dampak berkelanjutan seperti seorang ibu yang tidak berpendidikan cenderung tidak

---

<sup>7</sup> “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Buku Habis Gelap Terbitlah Terang, P 356. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i2.4305>

<sup>8</sup> Purwaningsih, S. M., Muchoiyaroh, L., & Biringan, J. (2018). Kartini and The Feminism Thinking in Javanese Nobles Women (Women Priyayi). 49. <https://doi.org/10.2991/ICSS-18.2018.12>

<sup>9</sup> Mutiah Amini, Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia (1928-1998) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 26.

dapat memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, sehingga lingkaran ketertinggalan itu terus berulang dari generasi ke generasi.

Kepenuhisan tentang "Rekonstruksi Simbol Kebudayaan Perempuan Dalam Peringatan Hari Kartini Di Surabaya Tahun 1950-1965." Berawal dari keresahan atas perayaan Hari Kartini masa kini yang terlalu fokus terhadap hal-hal simbolik dari Kartini tanpa mendalami dan memahami pemikiran dan perjuangannya. Hal-hal simbolik tersebut dominan meniru pakaian Kartini yang sebenarnya bukan esensi dari seorang Kartini karena hal tersebut merupakan pakaian dari zamanya. Sebab, kebaya merupakan warisan leluhur dalam hal seperangkat pakaian yang dilengkapi kain panjang batik atau jarik dan dilengkapi stagen sebagai pengikatnya.

Berkebaya secara lengkap pada awalnya banyak dipakai oleh kaum ningrat di keraton Solo dan Yogya pada acara tertentu. Dalam keseharian kebaya tidak saja dikenakan oleh kaum ningrat akan tetapi juga dikenakan oleh masyarakat biasa pada kesehariannya dengan dilengkapi jarik dan stagen untuk mengikatnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda sangat menyadari hal ini ketika mereka mengeluarkan aturan pada tahun 1872 yang mengharuskan setiap penduduk untuk menggunakan pakaian etnisnya masing-masing di tempat umum.<sup>10</sup> Seiring dengan berjalannya waktu berkebaya banyak ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap ribet pada pemakaiannya serta membatasi gerak langkah seseorang dalam beraktifitas di era modern ini. Sehingga mengenakan kebaya dianggap kuno, ketinggalan jaman dan tidak trendi. Dari sinilah muncul kerancuan: Kartini yang dikenang dengan semangat emansipatoris justru dikemas ulang dalam simbol-simbol yang kini dianggap membatasi perempuan itu sendiri.

Penulisan ini bertujuan untuk mengajak pembaca menggali ulang makna peringatan Hari Kartini, dengan melihat lebih dalam bagaimana simbol kebudayaan perempuan dikonstruksi dalam perayaan Hari Kartini di Surabaya

---

<sup>10</sup> Christine Claudia Lukman, Yasraf A. Piliang, and Priyanto Sunarto, "Kebaya Encim as the Phenomenon of Mimicry in East Indies Dutch Colonial's Culture", *Arts and Design Studies*, vol. 13 (2013), hlm. 15-22, <https://www.iiste.org/Journals/index.php/ADS/article/download/8080/8174>.

pada era 1950-1965. Sebuah periode dimana bangsa Indonesia tengah membentuk jati diri, termasuk narasi tentang perempuan. Dengan menelusuri jejak simbol dan pemikiran yang ditampilkan saat itu, diharapkan kita bisa memahami bahwa Kartini tidak hanya sosok dalam kebaya, tetapi seorang pemikir progresif yang berani menantang zamannya demi kemajuan perempuan dan bangsanya.

Adapun tujuan yang lain dari penulisan ini adalah untuk mengajak pembaca menyadari bahwa sosok Kartini sejatinya bukan hanya ikon budaya yang dikenang melalui pakaian tradisional semata, melainkan seorang pemikir progresif yang layak dijadikan suri teladan melalui gagasan dan perjuangannya dalam memperjuangkan emansipasi perempuan. Melalui penelusuran sejarah peringatan Hari Kartini di Surabaya pada tahun 1950-1965, tulisan ini ingin mengungkap bagaimana simbol-simbol budaya perempuan dikonstruksi dalam konteks sosial dan politik masa itu, serta bagaimana simbolisasi tersebut kerap kali mengaburkan makna esensial dari perjuangan Kartini sendiri.

Perlu disadari bahwa cara berpakaian Kartini dalam hal ini kebaya, jarik, dan stagen merupakan representasi dari budaya Jawa yang hidup dalam zamannya. Busana tersebut adalah warisan leluhur, bagian dari sistem budaya yang telah ada jauh sebelum Kartini lahir, dan bukan hasil dari pilihan ideologis Kartini secara personal. Oleh karena itu, menjadikan busana tersebut sebagai inti dari peringatan Hari Kartini tanpa menggali isi pemikirannya justru berisiko mereduksi nilai-nilai perjuangan yang telah ia rintis. Melalui kajian ini, penulis berharap dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menempatkan pemikiran dan gagasan Kartini sebagai pusat dari peringatan Hari Kartini, bukan semata-mata simbol lahiriah yang bersifat visual dan seremonial.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks kajian sejarah, budaya, dan representasi perempuan di Indonesia. Peringatan Hari Kartini selama ini telah menjadi bagian dari praktik budaya yang dilembagakan dalam masyarakat Indonesia. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa peringatan tersebut cenderung mengalami penyempitan makna di mana Kartini lebih

banyak dikenang melalui aspek simbolik seperti kebaya dan sanggul, ketimbang melalui gagasan-gagasannya yang revolusioner tentang pendidikan dan emansipasi perempuan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa semangat Kartini yang sejati semakin terpinggirkan oleh kemasan visual yang bersifat seremonial.

Melalui penelusuran sejarah peringatan Hari Kartini di Surabaya pada periode 1950-1965, penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana konstruksi simbol kebudayaan perempuan dibentuk, dikembangkan, dan dimaknai pada masa pascakemerdekaan sebuah fase penting ketika identitas nasional, termasuk peran perempuan, tengah dirumuskan. Surabaya sebagai salah satu kota besar yang progresif pada masa itu menawarkan ruang sosial-politik yang unik dalam melihat dinamika representasi perempuan, baik di tingkat pemerintah daerah, organisasi perempuan, maupun masyarakat umum.

Urgensi lain dari penelitian ini juga terletak pada pentingnya menghadirkan kembali Kartini sebagai tokoh pemikir dan penggerak sosial, bukan sekadar ikon budaya yang dipersonifikasikan dalam bentuk pakaian tradisional. Di tengah tantangan globalisasi dan komersialisasi budaya saat ini, masyarakat membutuhkan landasan historis yang kuat untuk membedakan antara penghormatan simbolik dengan pemaknaan substantif. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan identitas sejarah dan budaya perempuan Indonesia, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perjuangan perempuan bukanlah warisan yang diperingati sekali setahun, melainkan nilai yang harus terus dikaji, dipahami, dan dihidupkan dalam praktik sosial masa kini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam penjelasan Latar Belakang di atas dapat disimpulkan penulis membagi rumusan masalahnya menjadi beberapa, yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan peringatan Hari Kartini di Surabaya pada tahun 1950-1965
2. Bagaimana simbol kebudayaan perempuan dikonstruksikan dalam peringatan Hari Kartini di Surabaya pada masa tersebut?
3. Apa makna dan kepentingan ideologis di balik simbolisasi Kartini dalam peringatan Hari Kartini di Surabaya tahun 1950-1965?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan merekonstruksi simbol kebudayaan perempuan dalam peringatan Hari Kartini di Surabaya pada periode 1950 hingga 1965, dengan cara menyoroti perbedaan bentuk perayaan dan narasi yang muncul sebelum dan sesudah ditetapkannya Kartini sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden No. 108 Tahun 1964. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konstruksi simbolik terhadap sosok Kartini berperan dalam membentuk citra ideal perempuan Indonesia pada masa transisi dari Orde Lama menuju awal Orde Baru. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk peringatan Hari Kartini di Surabaya dalam kurun waktu 1950-1965.
2. Menganalisis perubahan simbol dan makna peringatan Hari Kartini sebelum dan sesudah terbitnya Keppres No. 108 Tahun 1964.
3. Mengkaji bagaimana konstruksi simbol kebudayaan perempuan dalam peringatan Hari Kartini merefleksikan dinamika ideologi negara terhadap peran perempuan pada masa itu.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis, yang dapat berguna tidak hanya bagi pengembangan ilmu sejarah dan studi gender, tetapi juga bagi kalangan masyarakat luas serta institusi-institusi pendidikan.

**a. Manfaat Teoritis**

## 1) Pengembangan Ilmu Sejarah Sosial-Budaya

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan historiografi Indonesia, khususnya dalam bidang sejarah sosial dan budaya, dengan fokus pada simbolisasi tokoh perempuan nasional dalam konteks lokal.

## 2) Kontribusi terhadap Kajian Sejarah Perempuan dan Gender

Penelitian ini memperkaya kajian sejarah perempuan di Indonesia dengan menyajikan pendekatan yang kritis terhadap simbolisasi R.A. Kartini dan pelestarian budaya yang cenderung bersifat domestikatif.

## 3) Penguatan Pendekatan Interdisipliner dalam Kajian Sejarah

Dengan menggunakan pendekatan sejarah budaya, sejarah ideologi, dan semiotika simbol, penelitian ini mendorong integrasi metode lintas bidang dalam studi sejarah, khususnya sejarah perayaan dan representasi simbolik.

**b. Manfaat Praktis**

## 1) Bagi Peneliti Sendiri

Penelitian ini menjadi wahana reflektif untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam merumuskan masalah sejarah, menelusuri sumber primer, dan menganalisis fenomena sosial secara kritis dalam kerangka akademik.

## 2) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini membuka wawasan bagi masyarakat tentang pentingnya memahami makna sebenarnya dari peringatan Hari Kartini, sekaligus mendorong sikap kritis terhadap bentuk-bentuk perayaan yang cenderung simbolik dan melupakan substansi perjuangan Kartini.

## 3) Bagi Institusi Pendidikan (Sekolah dan Universitas)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar tambahan dalam mata kuliah sejarah Indonesia, sejarah sosial budaya, sejarah perempuan, dan studi gender. Selain itu, universitas dapat menggunakan temuan ini untuk memperkaya referensi riset mahasiswa dan dosen dalam tema-tema sejarah dan budaya lokal.

#### 4) Bagi Pengambil Kebijakan Budaya dan Pendidikan

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun ulang bentuk peringatan Hari Kartini yang lebih reflektif dan substansial, serta mendorong revitalisasi narasi-narasi perempuan yang lebih adil, kritis, dan kontekstual.

### 1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan yang ditetapkan peneliti untuk mengarahkan fokus kajian agar tidak melebar dan tetap relevan dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian sejarah, ruang lingkup berfungsi untuk menentukan dimensi waktu (temporal), lokasi geografis (spasial), dan pokok persoalan (tematik) yang akan dianalisis secara mendalam. Penetapan ruang lingkup ini menjadi penting agar proses kajian bersifat sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Fungsi utama ruang lingkup adalah memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai batas-batas kajian yang dilakukan, sekaligus mencegah interpretasi yang menyimpang dari kerangka awal penelitian. Batasan tersebut juga membantu peneliti dalam menyaring data, memilih pendekatan, serta menyusun analisis yang sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Dalam penelitian ini, ruang lingkup dibagi menjadi tiga bagian:

#### a. Ruang lingkup temporal

Ruang lingkup temporal dalam penelitian ini difokuskan pada rentang waktu 1950 hingga 1965, yakni dua dekade awal setelah Indonesia merdeka yang penuh dinamika dalam pembentukan identitas nasional dan politik kebudayaan. Pemilihan kurun waktu ini bukan tanpa alasan, melainkan karena tahun-tahun tersebut merupakan masa penting di mana peringatan Hari Kartini mulai mendapatkan tempat dalam agenda resmi negara dan masyarakat sipil, khususnya di kota besar seperti Surabaya. Rentang waktu ini juga mencakup momen penting yaitu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) No. 108 Tahun 1964, yang menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Periode sebelum Keppres ini (1950-1963) menjadi titik penting untuk menelusuri bagaimana Hari Kartini diperingati secara lokal oleh masyarakat dan organisasi perempuan tanpa kerangka ideologis nasional yang baku.

Dalam masa ini, tampak adanya variasi bentuk perayaan, inisiatif masyarakat, serta peran media dan sekolah dalam mengangkat figur Kartini. Sedangkan periode setelah Keppres (1964-1965) memberi peluang untuk mengkaji perubahan makna dan bentuk peringatan, di mana negara mulai mengarahkan representasi Kartini menjadi lebih normatif dan ideologis. Dalam masa ini, tampak adanya variasi bentuk perayaan, inisiatif masyarakat, serta peran media dan sekolah dalam mengangkat figur Kartini. Peringatan Kartini di berbagai daerah tidak hanya menekankan aspek domestik seorang perempuan, tetapi juga menegaskan perannya sebagai simbol emansipasi, terutama dalam kaitannya dengan perjuangan akses pendidikan dan kesetaraan sosial. Menurut Saskia E. Wieringa, organisasi perempuan seperti *Gerwani* memiliki peran aktif dalam memperluas tafsir Kartini yang lebih progresif. Mereka menempatkan Kartini bukan sekadar sebagai figur ibu atau istri teladan, melainkan sebagai ikon perjuangan melawan struktur patriarki dan ketidakadilan sosial. Dengan demikian, perayaan Hari Kartini pada periode ini sering diwarnai dengan agenda politik emansipasi yang sejalan dengan semangat demokrasi terpimpin awal.

Tahun 1965 ditetapkan sebagai batas akhir penelitian karena merupakan tahun transisi besar dalam sejarah politik Indonesia, yang berdampak pula pada kebijakan kebudayaan dan representasi tokoh nasional, termasuk Kartini. Dengan batasan temporal ini, peneliti dapat melakukan pembacaan historis yang terfokus pada bagaimana peringatan Hari Kartini direkonstruksi dalam wacana sosial-politik dan kultural di tengah pusaran ideologi Orde Lama menjelang tumbangannya rezim Sukarno.

#### **b. Ruang Lingkup Spasial**

Ruang lingkup spasial penelitian ini secara khusus dibatasi pada wilayah administratif Kota Surabaya, yang dalam kurun waktu 1950-1965 merupakan salah satu pusat politik, pendidikan, dan kebudayaan di Indonesia bagian timur. Kota ini tidak hanya menjadi ibu kota Provinsi Jawa Timur, tetapi juga menjadi tempat aktifnya berbagai organisasi perempuan, institusi pendidikan, media massa lokal, serta birokrasi pemerintahan yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perayaan Hari Kartini.

Surabaya dipilih karena memiliki kekayaan dokumentasi historis terkait peringatan Hari Kartini, sebagaimana ditemukan dalam berbagai arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, dokumentasi komunitas lokal seperti Yayasan Kartini Siak Surabaya, serta artikel-artikel surat kabar lama baik dalam bahasa Indonesia maupun Belanda. Selain itu, Surabaya juga merepresentasikan ruang simbolik di mana konstruksi budaya perempuan pada masa itu dipertunjukkan melalui lomba-lomba, pidato, pameran, dan pawai dalam rangka Hari Kartini.

Pembatasan spasial ini memungkinkan penelitian untuk lebih fokus menelusuri pola-pola lokal, bukan hanya mengikuti narasi nasional. Hal ini penting karena meskipun Keppres 108/1964 bersifat nasional, implementasi dan representasi simbolik Kartini di tiap kota dapat berbeda. Surabaya sebagai kota besar yang berideologi kuat dan memiliki sejarah perempuan yang panjang serta memberi ruang yang kaya untuk pembacaan simbolik dan politis terhadap perayaan Hari Kartini.

### **c. Ruang Lingkup Tematik**

Ruang lingkup tematik dalam penelitian ini difokuskan pada rekonstruksi simbol kebudayaan perempuan dalam peringatan Hari Kartini di Surabaya tahun 1950-1965. Simbol kebudayaan perempuan yang dimaksud tidak hanya berupa tampilan luar seperti busana adat atau peragaan ibu rumah tangga ideal, tetapi juga mencakup gagasan-gagasan dominan tentang peran, fungsi, dan tempat perempuan dalam masyarakat yang direproduksi melalui acara-acara peringatan Kartini. Penelitian ini secara khusus membatasi pembahasan pada tiga fokus utama: 1) bentuk dan pelaksanaan peringatan Hari Kartini, 2) simbolisasi perempuan ideal yang muncul dalam peringatan tersebut, dan 3) makna ideologis di balik simbolisasi itu.

Secara tematik, penelitian ini tidak akan membahas seluruh aspek sejarah perempuan atau perjuangan Kartini secara umum, tetapi hanya menyoroti bagaimana pemikiran dan warisan Kartini ditampilkan (atau

disembunyikan) dalam kegiatan peringatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan di Surabaya. Dengan kata lain, penelitian ini membatasi dirinya hanya pada representasi dan konstruksi simbolik yang terjadi dalam acara peringatan, bukan dalam karya asli Kartini atau biografi personalnya.

Batasan tematik ini juga membedakan antara Kartini sebagai tokoh historis dengan Kartini sebagai simbol budaya, di mana fokus penelitian adalah pada transformasi simbol tersebut dalam konteks politik dan kebudayaan lokal Surabaya pada masa pascakolonial. Dengan demikian, penelitian ini tidak berupaya melakukan kritik feminis atas teks *Habis Gelap Terbitlah Terang*, tetapi lebih tertarik melihat bagaimana negara dan masyarakat membingkai ulang Kartini dalam narasi yang sesuai dengan kepentingan ideologis pada masa itu.

### **1.6 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memetakan berbagai studi sebelumnya yang relevan, baik yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku akademik, maupun dokumen historis, yang memiliki keterkaitan dengan tema utama penelitian ini, yaitu pemikiran dan perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam konteks emansipasi perempuan. Selain itu, bagian ini dimaksudkan untuk menunjukkan posisi dan kontribusi khas dari penelitian yang akan dilakukan, serta membangun landasan teoretis dan konseptual yang memperkuat arah analisis. Tinjauan pustaka ini mencakup pemaparan teori dan pendekatan yang digunakan dalam menelaah tokoh sejarah, studi-studi terdahulu mengenai R.A. Kartini, nilai-nilai perjuangannya, serta analisis relevansi pemikiran Kartini terhadap realitas perempuan Indonesia masa kini. Dengan menyajikan beragam literatur yang valid dan kredibel, peneliti tidak hanya mendasarkan analisis pada kerangka ilmiah yang telah ada, tetapi juga berupaya mengidentifikasi celah-celah penelitian yang

belum banyak disentuh, sehingga riset ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih signifikan.

Pemikiran Kartini telah banyak dikaji sebagai fondasi intelektual perjuangan perempuan Indonesia. Dalam karya *Habis Gelap Terbitlah Terang*, yang diterbitkan pertama kali oleh Abendanon (1911), surat-surat Kartini menggambarkan gagasan emansipasi perempuan Jawa yang terjebak dalam kungkungan adat, struktur patriarkis, dan keterbatasan pendidikan. Dalam kajian historiografis, Kartini kerap dimaknai sebagai proto-feminis Indonesia, seperti dianalisis oleh Saskia Wieringa (2002) dalam *Sexual Politics in Indonesia*, yang menyebut Kartini sebagai tokoh yang membawa pemikiran progresif tentang tubuh, pendidikan, dan kemerdekaan perempuan.

Selain itu, buku *Kartini: Sebuah Biografi Intelektual* oleh Pramoedya Ananta Toer (2006) menunjukkan bahwa Kartini bukan hanya tokoh simbolik, melainkan pemikir radikal yang secara tegas mengkritik kolonialisme dan ketimpangan kelas. Kajian ini penting karena menunjukkan bahwa pemikiran Kartini bukanlah pasif, namun aktif dan bahkan politis dalam konteks zamannya. Hal ini diperkuat oleh jurnal *Journal of Southeast Asian Studies* (Vol. 43, No. 2, 2012) yang memuat tulisan Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa pemikiran Kartini sebenarnya lebih mendekati cita-cita sosialisme daripada sekadar agenda emansipatoris gaya Barat.

Penelitian ini mengambil posisi kritis terhadap dekonstruksi simbol Kartini yang terjadi selama masa Orde Baru, di mana pemikiran radikal Kartini direduksi menjadi simbol domestikasi perempuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas sosok Kartini secara tekstual, tetapi juga menelaah bagaimana wacana tentang Kartini dikonstruksi ulang menjadi alat legitimasi budaya negara.

Simbolisasi Kartini selama Orde Baru mendapat perhatian serius dalam berbagai studi budaya dan sejarah. Buku *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia* oleh Julia Suryakusuma (1996) menjadi rujukan utama dalam menelusuri bagaimana

sebagai istri, ibu, dan pengatur rumah tangga. Dalam konteks ini, Kartini diposisikan bukan sebagai pemikir yang kritis, melainkan ikon pakaian adat, memasak, dan parade bunga, sebagaimana terekam dalam peringatan Hari Kartini setiap 21 April.

Studi kritis lainnya terdapat dalam jurnal *Indonesia* terbitan Cornell University (No. 90, 2010) oleh Karen Strassler, yang menganalisis perayaan Kartini Day sebagai bagian dari ritual visual negara. Kartini diposisikan sebagai simbol integrasi nasional dan harmoni sosial, menjauh dari narasi resistensi terhadap kekuasaan kolonial dan feodal. Dalam penelitian ini, peringatan Hari Kartini di Surabaya tahun 1950-1965 diposisikan sebagai tahap awal terbentuknya simbol Kartini yang kemudian dikonsolidasikan di masa Orde Baru. Penelitian ini bertujuan memetakan bagaimana simbolisasi tersebut mulai dikonstruksi, serta sejauh mana pelibatan perempuan dalam perayaan tersebut mencerminkan kontrol budaya negara atas wacana perempuan.

Kajian tentang sejarah lokal, khususnya peran perempuan dalam ruang publik Surabaya, mulai mendapatkan perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Dalam buku *Perempuan dalam Sejarah Indonesia* (2012) yang disusun oleh Asvi Warman Adam dkk., disinggung bagaimana simbol-simbol perempuan di kota-kota besar seperti Surabaya memainkan peran dalam pembentukan identitas nasional dan budaya kota pasca-kemerdekaan. Penelitian Tri Wahyuni (2019) dalam *Jurnal Sejarah dan Budaya Kota* meneliti bagaimana komunitas perempuan Surabaya membentuk asosiasi sosial dan aktif dalam kegiatan pendidikan serta sosial-politik sebelum dikonsolidasi oleh negara.

Surabaya sebagai kota modern dan pusat nasionalisme memiliki dinamika unik. Festival dan perayaan hari besar, termasuk Hari Kartini, menjadi arena ideologis di mana negara, elite lokal, dan kelompok perempuan saling membentuk wacana. Buku *Modern Women in Indonesia: Representation, Politics and Identity* (Barbara Hatley, 2007) menunjukkan

bagaimana perempuan Indonesia di kota-kota besar digunakan sebagai simbol representatif dalam politik visual negara.

Penelitian ini menempatkan Surabaya sebagai lokus penting dalam melihat transformasi simbol perempuan pada masa awal pasca-kemerdekaan. Fokusnya adalah bagaimana simbol Kartini dalam peringatan Hari Kartini menjadi sarana negara dan elite lokal untuk membingkai ulang perempuan dalam kerangka budaya dan politik Orde Lama menjelang masa konsolidasi Orde Baru.

Dalam bukunya ini, Musdah Mulia membongkar mitos dan ideologi patriarki dalam budaya Indonesia dengan pendekatan Islam progresif. Ia menyoroti bagaimana perempuan sering dijadikan simbol, tetapi akses terhadap ruang politik, ekonomi, dan pendidikan tetap terbatas. Buku ini relevan dengan kajian rekonstruksi simbol kebudayaan perempuan, sebab ia menegaskan bahwa penghormatan simbolik kepada perempuan seperti Kartini seringkali tidak diiringi dengan komitmen struktural terhadap keadilan gender. Dalam konteks peringatan Hari Kartini di era Orde Lama, buku ini membantu menunjukkan bahwa simbolisasi Kartini bisa jadi hanya memperkuat citra domestik perempuan tanpa menggugat struktur ketimpangan yang ada.

Penelitian ini menempatkan dirinya pada irisan antara kajian sejarah dan gender, di mana simbolisasi terhadap Kartini dalam peringatan Hari Kartini di Surabaya tahun 1950-1965 bisa dibaca sebagai bagian dari proses domestikasi perempuan oleh negara. Menggunakan pendekatan seperti Musdah Mulia, penelitian ini akan menunjukkan bahwa Orde Lama, melalui perayaan yang tampak memuliakan perempuan, justru memperkuat simbol-simbol budaya yang tidak progresif terhadap cita-cita Kartini tentang pendidikan, emansipasi, dan kesetaraan. Dengan begitu, penelitian ini tidak sekadar menjadi kritik historis, tetapi juga refleksi ideologis terhadap manipulasi simbolik negara terhadap figur perempuan dalam sejarah.

Wieringa, Saskia (2002). "The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism" - *Journal of Women's History*. Wieringa membahas bagaimana negara membentuk identitas perempuan dalam

kaitannya dengan ideologi negara dan nasionalisme. Ia menunjukkan bahwa politik reproduksi dan seksualitas perempuan dikontrol untuk mendukung stabilitas negara. Meskipun fokusnya pada era Orde Baru, artikelnya memberikan fondasi teoritis yang penting untuk memahami bagaimana peran perempuan dimanipulasi lewat simbol dan ritual kenegaraan.

Penelitian ini memperluas kerangka Wieringa dengan cara membawanya ke konteks sebelum Orde Baru, yakni Orde Lama di Surabaya. Penelitian ini akan membuktikan bahwa praktik simbolisasi perempuan sebagai ibu, pendidik anak, dan penjaga moral bangsa, sudah dimulai jauh sebelum Soeharto naik ke tampuk kekuasaan. Peringatan Hari Kartini menjadi salah satu wahana politik simbolik yang menampilkan perempuan dalam kerangka nasionalisme domestik. Dengan menganalisis berbagai peringatan Hari Kartini, penelitian ini akan memetakan bagaimana ideologi negara membentuk simbol budaya perempuan yang tampaknya memuliakan, tetapi sejatinya menjinakkan dan mengontrol.

Hatley, Barbara (1999). "Cultural Expression in Contemporary Indonesia" *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*. Hatley membahas bagaimana seni, sastra, dan ekspresi budaya digunakan untuk menyuarakan (atau menutup) persoalan sosial-politik, termasuk gender. Ia menyatakan bahwa pertunjukan budaya di ruang publik seringkali membawa muatan ideologis, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam konteks ini, peringatan Hari Kartini yang diisi dengan pawai, lomba busana, dan pidato, bukanlah peristiwa netral, melainkan sarat muatan kebudayaan yang dikonstruksi.

Penelitian ini mengikuti pendekatan Hatley dengan mengurai peringatan Hari Kartini sebagai representasi kebudayaan simbolik yang menampilkan tubuh dan citra perempuan dalam kerangka tertentu. Di Surabaya tahun 1950-1965, berbagai kegiatan peringatan Hari Kartini menjadi ajang ekspresi budaya yang tampak menyenangkan tetapi sebenarnya terkooptasi oleh konstruksi gender yang hegemonik. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi bagaimana simbol-simbol budaya perempuan dibentuk, didaur

ulang, dan didistribusikan dalam ruang sosial, serta bagaimana perempuan (dan masyarakat) menanggapi dalam konteks lokal Surabaya.

### 1.7 Kerangka Konseptual

Penelitian ini disusun dalam kerangka metodologis sejarah, dengan penekanan pada proses rekonstruksi makna dan simbol-simbol kebudayaan yang dilekatkan pada representasi perempuan dalam peringatan Hari Kartini di Surabaya pada rentang tahun 1950 hingga 1965. Dalam konteks ini, kerangka konseptual bertujuan untuk memberikan arah teoritis dan metodologis atas penyusunan data dan interpretasi terhadap peristiwa masa lalu, serta menjelaskan bagaimana penelitian ini berupaya menggali narasi yang selama ini kerap luput dari perhatian historiografi arus utama, khususnya yang berkaitan dengan dimensi simbolik perempuan dalam lanskap budaya pasca-kemerdekaan.

Penelitian ini berada dalam lanskap studi sejarah sosial-budaya, yang tidak hanya mendeskripsikan peristiwa dan fakta, tetapi juga menelaah secara kritis makna-makna di balik tindakan sosial dan ekspresi budaya yang terjadi dalam rentang waktu tertentu. Simbol kebudayaan perempuan dalam konteks peringatan Hari Kartini menjadi titik masuk yang penting untuk membaca dinamika relasi gender, negara, dan masyarakat dalam periode pasca-kolonial awal hingga masa transisi menuju era Orde Baru.

Dalam membangun analisis, penelitian ini menggunakan dua fondasi utama: teori simbolik Clifford Geertz yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *The Interpretation of Culture* dan diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Tafsir Kebudayaan*, diterjemahkan oleh Fransisco Budi Hardiman. Teori simbolik Geertz memandang budaya sebagai sistem simbol yang memberi makna pada tindakan manusia. Dalam konteks ini, peringatan Hari Kartini diposisikan sebagai ruang simbolik di mana makna tentang "perempuan ideal", "peran domestik", dan "nasionalisme feminin" dikonstruksi, direproduksi, atau bahkan dikontrol oleh negara dan institusi sosial tertentu.

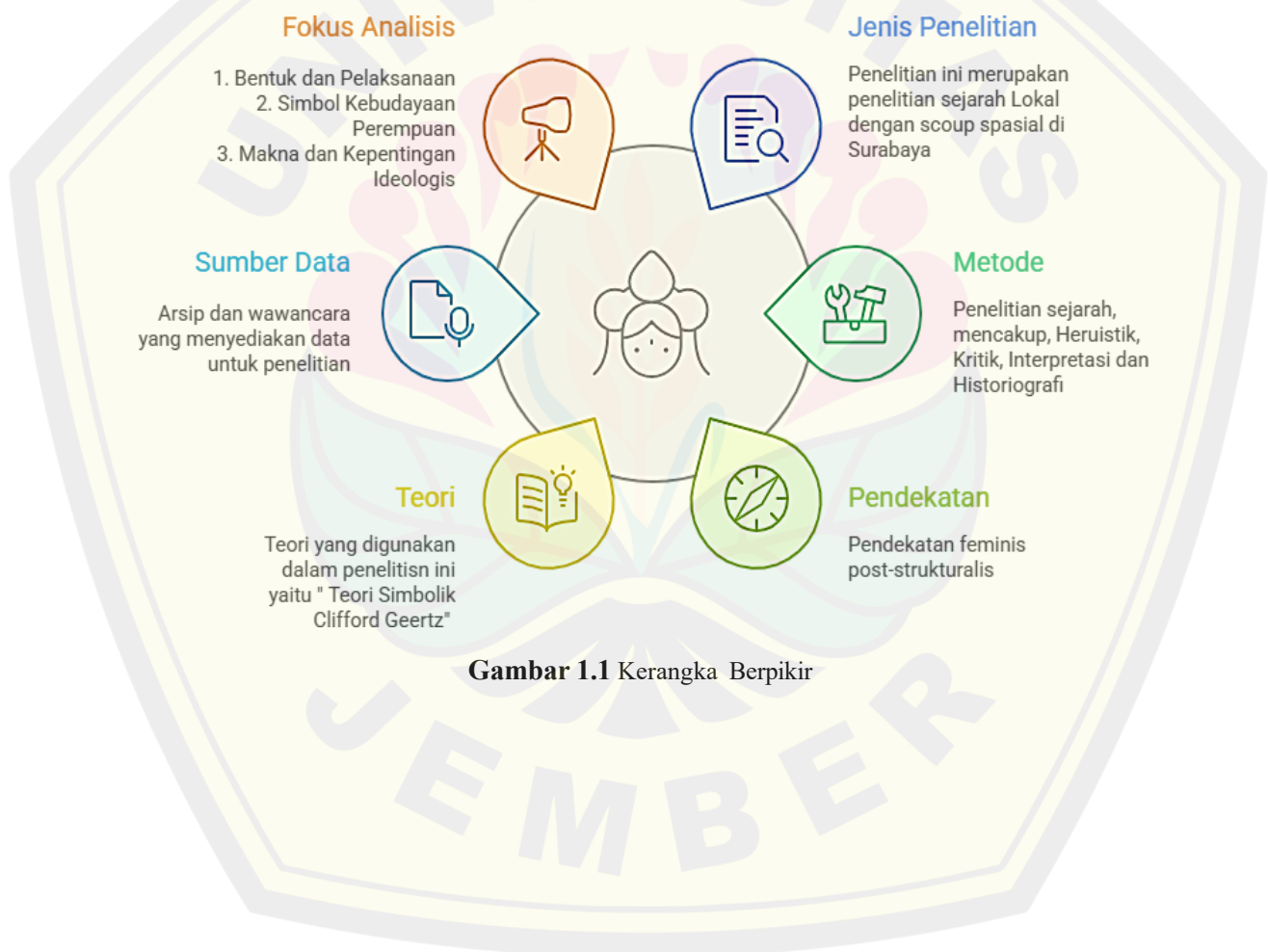
Geertz dalam *Tafsir Kebudayaan* (1983) menegaskan bahwa budaya tidak bisa direduksi hanya pada struktur atau perilaku, melainkan harus dipahami sebagai teks yang bisa “dibaca” dan ditafsirkan secara mendalam. Oleh karena itu, setiap elemen dalam peringatan Hari Kartini seperti busana adat, pidato, puisi, lomba-lomba keterampilan perempuan, serta narasi media yang dipahami sebagai simbol yang memiliki makna kultural dan ideologis. Simbol-simbol ini kemudian ditafsirkan untuk mengungkap bagaimana konstruksi perempuan dibentuk dalam kerangka nasionalisme dan pembangunan pasca-kemerdekaan.

Sebagai pelengkap, pendekatan feminis post-strukturalis yang diwakili oleh pemikiran Michel Foucault dan Judith Butler digunakan untuk mengurai wacana kuasa dalam representasi perempuan. Foucault memandang wacana sebagai alat produksi pengetahuan yang membentuk subjek. Dalam konteks ini, representasi perempuan dalam peringatan Hari Kartini bukanlah sekadar ekspresi budaya yang netral, melainkan merupakan produk dari wacana dominan yang membentuk norma-norma gender dan struktur kuasa.

Judith Butler (1990) dalam *Gender Trouble* menekankan bahwa gender bukanlah identitas yang stabil, melainkan performatif, yakni hasil dari tindakan berulang yang dibentuk oleh norma sosial. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan dalam peringatan Hari Kartini dapat dilihat sebagai bentuk performativitas yang menciptakan kembali identitas perempuan sesuai dengan harapan negara atau elite lokal saat itu. Pendekatan ini memberi kerangka untuk membaca ulang makna dan fungsi dari simbol-simbol kebudayaan perempuan dalam ruang publik.

Tujuan dari kerangka konseptual ini adalah untuk memberikan dasar teoritik dan arah analisis yang konsisten dalam menelaah proses rekonstruksi simbol-simbol kebudayaan perempuan dalam peringatan Hari Kartini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk sekedar mencatat kegiatan seremonial yang berlangsung dari tahun ke tahun, melainkan untuk menggali struktur simbolik dan ideologis yang tersembunyi di balik bentuk-bentuk perayaan tersebut.

Ruang lingkup dari kerangka ini mencakup tiga ranah utama: 1) bagaimana simbol-simbol kebudayaan perempuan dikonstruksi melalui kegiatan Hari Kartini, 2) bagaimana negara dan institusi lokal memainkan peran dalam pembentukan makna-makna tersebut, dan 3) bagaimana makna simbolik ini mengalami perubahan atau kontinuitas dari tahun 1950 hingga 1965. Selain itu, kerangka konseptual ini juga menjadi pembeda atau ciri khas dari penelitian sejenis. Berbeda dari penelitian sejarah biografis atau kronologis semata, penelitian ini menempatkan simbol sebagai locus utama dalam penyusunan narasi sejarah. Simbol tidak hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai entitas yang mampu mengungkap relasi kuasa, narasi kebudayaan, dan artikulasi identitas perempuan di ruang publik.



**Gambar 1.1** Kerangka Berpikir

## 1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan objektif. Dalam penelitian sejarah, terdapat empat tahapan utama yang dilakukan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama, Heuristik merupakan tahap awal dalam metodologi penelitian sejarah yang berfungsi untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menghimpun sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, heuristik diarahkan pada pencarian dokumen, arsip, berita, dan sumber naratif yang berkaitan dengan peringatan Hari Kartini di Surabaya antara tahun 1950 hingga 1965.

Penelusuran pertama dilakukan secara daring melalui Delpher.nl, sebuah portal digital milik *Koninklijke Bibliotheek* (Perpustakaan Nasional Belanda) yang mengarsipkan ribuan surat kabar kolonial. Dengan menggunakan kata kunci “Kartini” dan “Soerabaja” dalam kurun waktu 1950-1965, peneliti menemukan sejumlah artikel berita terkait perayaan Hari Kartini di Hindia Belanda pasca-kemerdekaan. Delpher menjadi sangat penting karena mengarsipkan banyak dokumen pers kolonial dan pascakolonial yang jarang tersedia di Indonesia. <https://www.delpher.nl> Selanjutnya, peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan sumber fisik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur (DPKP Jatim) yang berlokasi di Surabaya. Dari kunjungan langsung tersebut, diperoleh dokumen cetak, foto kegiatan, dan laporan tertulis perayaan Hari Kartini di lingkungan pemerintahan daerah, sekolah, dan organisasi perempuan sepanjang dekade 1950-an dan awal 1960-an. Sebagian dokumen tersebut juga telah didigitalkan dan tersedia melalui situs resminya. <https://dapustaka.jatimprov.go.id>

Selain arsip resmi, peneliti menggali sumber sekunder berupa wawancara dengan ketua *Yayasan Kartini Surabaya* yang berlokasi di Jalan Siak. Yayasan ini menyimpan sejumlah dokumen pribadi, memorabilia, dan menjadi tempat berkumpulnya tokoh-tokoh perempuan lokal. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memahami sejarah lokal perayaan Hari Kartini di Surabaya pada periode yang diteliti. Data ini

memberikan gambaran mikro tentang bagaimana masyarakat menginternalisasi dan menampilkan sosok Kartini dalam ranah kultural.

Seluruh sumber tersebut menjadi fondasi untuk menafsirkan bentuk

simbolisasi Kartini dan bagaimana ideologi negara serta masyarakat lokal turut mempengaruhi konstruksi citra perempuan pada masa itu. Melalui kombinasi sumber digital, arsip fisik, wawancara, dan studi pustaka, tahap heuristik ini memberikan dasar historis dan empiris yang kokoh bagi analisis penelitian selanjutnya.

Tahap kedua, setelah semua bahan terkumpul, langkah selanjutnya adalah memilah dan mengevaluasi sumber berdasarkan dua jenis kritik: kritik eksternal dan kritik internal. Dalam kritik eksternal, peneliti memastikan keaslian sumber dengan memeriksa asal-usul dokumen, tahun terbit, institusi penerbit, serta otoritas penulisnya. Misalnya, artikel dari *De Locomotief* dan *Soerabaijasch Handelsblad* diperiksa secara teliti untuk memastikan keabsahannya sebagai bahan rujukan. Sementara itu, kritik internal dilakukan dengan menganalisis isi teks secara mendalam. Peneliti meninjau sejauh mana informasi yang disajikan mencerminkan realitas sosial pada zamannya atau memiliki bias tertentu, mengingat sebagian besar sumber berasal dari media kolonial atau institusi negara.

Setelah sumber diseleksi dan diuji, tahap berikutnya adalah menafsirkan isi dari dokumen-dokumen tersebut. Pada tahap ini, peneliti menyusun pemahaman mengenai bentuk dan makna dari perayaan Hari Kartini, serta bagaimana simbol-simbol kebudayaan perempuan seperti kebaya, puisi, seni tradisional, atau pidato ditampilkan dan ditafsirkan dalam konteks sosial-politik saat itu. Penafsiran ini juga mengaitkan dinamika peringatan Hari Kartini dengan transformasi identitas perempuan pasca-kemerdekaan. Peneliti mengamati pergeseran makna peringatan tersebut, khususnya setelah Kartini ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui Keppres No. 108 Tahun 1964. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya mengungkap apakah simbol-simbol budaya tersebut memperkuat atau justru menyelewengkan pemikiran Kartini yang dikenal kritis dan progresif.

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah menyusun hasil temuan dalam bentuk penulisan sejarah (historiografi). Dalam penulisan ini, peneliti merangkai data secara kronologis dan analitis, menguraikan perkembangan peringatan Hari Kartini di Surabaya dalam rentang 1950-1965. Narasi yang dibangun tidak hanya menyajikan fakta sejarah, tetapi juga memberikan kritik terhadap cara-cara peringatan tersebut dikonstruksi secara simbolik.

Melalui pendekatan ini, peneliti mencoba menyajikan kembali makna peringatan Hari Kartini secara lebih utuh tidak sekadar menampilkan Kartini sebagai figur dalam busana kebaya, tetapi sebagai pemikir yang berjuang keras melawan sistem sosial yang menindas perempuan. Historiografi ini mengajak pembaca untuk meninjau ulang cara pandang terhadap simbol budaya perempuan dan mendalami kembali nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Kartini.



## 1.9 Sistematika Penulisan

### **BABI: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup (batasan) penelitian, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Ruang Lingkup Penelitian
- 1.6 Sistematika Penulisan

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan kajian terhadap berbagai pustaka dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Juga mencakup kerangka teori dan pendekatan yang digunakan.

- 1.7 Kajian Penelitian Terdahulu
- 1.8 Teori Simbolik Clifford Geertz
- 1.9 Pendekatan Penelitian
- 1.10 Kerangka Konseptual

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan secara rinci jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta tahapan analisis.

## **BAB II. BENTUK DAN PELAKSANAAN PERINGATAN HARI KARTINI DI SURABAYA (1950-1965)**

Bab ini menjawab rumusan masalah pertama, dengan fokus pada deskripsi bentuk kegiatan, organisasi penyelenggara, lokasi, dan peran aktor-aktor penting dalam penyelenggaraan peringatan.

- 2.1 Konteks Historis Surabaya Pasca-Kemerdekaan
- 2.2 Dinamika Sosial dan Politik Perempuan
- 2.3 Ragam Aktivitas dalam Peringatan Hari Kartini

## **BAB III. KONSTRUKSI SIMBOL KEBUDAYAAN PEREMPUAN DALAM PERINGATAN HARI KARTINI (1950-1965)**

Bab ini menjawab rumusan masalah kedua dengan menelaah simbolisasi kebudayaan perempuan dalam acara Hari Kartini, termasuk pakaian adat, narasi pidato, peran seni dan sastra.

- 3.1 Representasi Kartini dalam Simbol dan Upacara

3.2 Symbolisme Busana dan Tarian

3.3 Perempuan sebagai Subjek dan Objek Simbol

#### **BAB IV. MAKNA DAN KEPENTINGAN IDEOLOGIS DI BALIK PERINGATAN HARI KARTINI (1950-1965)**

Bab ini menjawab rumusan masalah ketiga dengan mengeksplorasi makna politis, ideologis, dan kultural dari simbolisasi Kartini, serta kepentingan negara dan elite perempuan di balik perayaan tersebut.

4.1 Kartini dan Politik Identitas Nasional

4.2 Perayaan Kartini sebagai Alat Negara

4.3 Pertarungan Makna Kartini antar Kelompok Sosial

#### **BAB V. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran untuk kajian lebih lanjut.

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi seluruh sumber pustaka dan arsip yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **LAMPIRAN**

Meliputi dokumen pendukung seperti foto peringatan Hari Kartini, transkrip.

## BAB 2. BENTUK DAN PELAKSANAAN PERINGATAN HARI KARTINI DI SURABAYA (1950-1965)

Bab ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yakni bagaimana bentuk dan pelaksanaan peringatan Hari Kartini di Surabaya pada kurun waktu 1950-1965. Penelitian ini mendeskripsikan berbagai kegiatan, organisasi penyelenggara, lokasi, serta peran aktor-aktor penting yang membentuk praktik peringatan Kartini di tingkat lokal. Khususnya, wilayah administrasi Surabaya karena arsip-arsip yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya terbatas pada wilayah tersebut. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada sumber arsip, dokumentasi, dan kajian akademik yang relevan, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dalam kerangka sejarah sosial dan budaya.

### 2.1 Konteks Historis Surabaya Pasca-Kemerdekaan

Pasca pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, Surabaya segera meneguhkan dirinya sebagai salah satu kota terpenting di Indonesia. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, posisi geografis Surabaya yang berada di pesisir utara Pulau Jawa menjadikannya simpul perdagangan, transportasi, sekaligus pusat pemerintahan regional. Kondisi ini memberikan Surabaya peran strategis dalam pembangunan politik, ekonomi, dan kebudayaan Indonesia pada periode 1950-1965.<sup>12</sup>

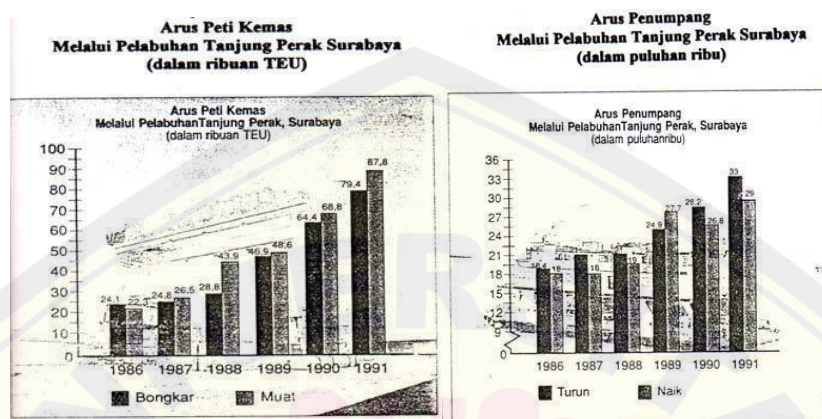
Secara geografis, Surabaya terhubung dengan jalur laut internasional melalui Selat Madura dan menjadi pintu gerbang utama distribusi barang ke kawasan timur Indonesia. Pelabuhan Tanjung Perak yang telah berkembang sejak masa kolonial Belanda, pada periode pasca-kemerdekaan berfungsi vital sebagai penghubung arus ekspor-impor dan logistik nasional. Menurut laporan *Departemen Perhubungan Laut* tahun 1955<sup>13</sup>, lebih dari 40% distribusi barang

---

<sup>12</sup> Hartono, S., & Handinoto, H. (2007). Surabaya Kota Pelabuhan (Surabaya Port City) Studi tentang perkembangan bentuk dan struktur sebuah kota pelabuhan ditinjau dari perkembangan transportasi akibat situasi politik dan ekonomi dari abad 13 sampai awal abad 21. *Journal of Architecture and Built Environment*, 35(1), 88-99. <https://doi.org/10.9744/DIMENSI.35.1.hlm.88-99>

<sup>13</sup> Ibid.

dari Jawa menuju kawasan timur Indonesia melewati Tanjung Perak, menegaskan posisi Surabaya sebagai pusat ekonomi maritim. Dengan demikian, Surabaya tidak hanya memainkan peran dalam skala regional, tetapi juga dalam konteks nasional.



Gambar 2.1 Statistik Distribusi

Selain perannya di bidang ekonomi, Surabaya juga meneguhkan dirinya sebagai pusat administratif dan politik Jawa Timur. Sebagai kota provinsi, Surabaya menjadi tempat berkantornya gubernur, perangkat birokrasi, dan lembaga pemerintahan lainnya.<sup>14</sup> Kehadiran pusat kekuasaan regional ini memberi Surabaya posisi tawar tinggi dalam percaturan politik nasional. Tidak jarang, keputusan politik di Surabaya ikut mempengaruhi dinamika politik Indonesia, terutama karena Jawa Timur memiliki basis massa partai politik yang besar, mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), hingga Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kedudukan strategis Surabaya juga terlihat dari geliat pendidikannya. Pada awal 1950-an, berdiri lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Airlangga (1954), yang memperkuat peran Surabaya sebagai kota pelajar sekaligus pusat intelektual di Jawa Timur.<sup>15</sup> Kehadiran lembaga pendidikan

<sup>14</sup> Damayanti, R. (2006). Planning issue and problem in surabaya, indonesia. *Journal of Architecture and Built Environment*, 34(1), 40-43. <https://doi.org/10.9744/DIMENSI.34.1.PP>

<sup>15</sup> Hartono S. (2007). *Surabaya Kota Pelabuhan (Surabaya Port City): Studi tentang perkembangan bentuk dan struktur sebuah kota pelabuhan ditinjau dari perkembangan transportasi akibat revolusi teknologi*. *Dimensi Teknik Arsitektur*, 35(1), 92-100. Universitas Kristen Petra

modern ini turut mencetak generasi baru yang berperan dalam pembangunan pasca-kolonial. Selain itu, sekolah-sekolah menengah dan organisasi kepemudaan di Surabaya berkembang pesat, menjadikan kota ini arena penting bagi mobilisasi gagasan, baik dalam ranah nasionalisme, agama, maupun sosialisme. Modernisasi kota juga tampak dalam perkembangan infrastruktur dan kehidupan urban. Surabaya, yang sempat hancur akibat pertempuran 10 November 1945, mulai dipulihkan melalui program pembangunan kota yang dilakukan pemerintah daerah dengan dukungan pusat. Jalan raya diperlebar, perumahan rakyat dibangun, dan pusat-pusat perdagangan diperkuat. Kawasan Tunjungan, misalnya, kembali menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial, sekaligus simbol kebangkitan urban Surabaya.

Namun, posisi strategis Surabaya tidak hanya tercermin dalam bidang ekonomi dan pemerintahan, melainkan juga dalam aspek simbolis. Julukan “Kota Pahlawan” yang melekat sejak peristiwa 10 November 1945 menempatkan Surabaya dalam lanskap nasionalisme Indonesia.<sup>16</sup> Sehingga, identitas heroik ini memberi bobot ideologis yang kuat, di mana setiap pembangunan politik dan kebudayaan di Surabaya senantiasa dihubungkan dengan memori kolektif perjuangan. Narasi kepahlawanan ini tidak hanya dihidupkan melalui monumen dan peringatan tahunan, tetapi juga melalui praktik kebudayaan sehari-hari yang memberi ruang bagi warga untuk merayakan identitas kota mereka. Identitas kepahlawanan Surabaya berakar kuat pada pengalaman kolektif rakyatnya dalam pertempuran 10 November 1945, yang menandai perlawanan bersenjata terbesar melawan kolonialisme pasca-Proklamasi. Dari momentum itulah, Surabaya memperoleh julukan Kota Pahlawan yang melekat hingga dekade-dekade berikutnya.<sup>17</sup> Pada periode 1950-1965, identitas heroik ini tidak hanya berfungsi sebagai ingatan sejarah,

---

<sup>16</sup> Dick, H. (2003). *Surabaya, city of work: a socioeconomic history, 1900-2000*. Singapore University Press. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA56511904>

<sup>17</sup> . (Basundoro, P. (2012). Problem Pemukiman Pascarevolusi Kemerdekaan: Studi tentang Pemukiman Liar di Kota Surabaya 1945-1960. *Humaniora*, 16(3), 346 <https://doi.org/10.22146/JH.V16I3.1314>)

tetapi juga sebagai modal ideologis yang terus diproduksi, dipelihara, dan dimanfaatkan dalam berbagai praktik politik maupun kebudayaan.

Pasca-pengakuan kedaulatan tahun 1949, pemerintah pusat dan daerah berupaya meng-institusionalisasi memori perjuangan Surabaya.<sup>18</sup> Monumen Tugu Pahlawan yang dibangun pada awal 1950-an adalah contoh konkret bagaimana negara mengabadikan peristiwa 10 November sebagai simbol persatuan nasional. Peresmian monumen ini oleh Presiden Soekarno pada 10 November 1952 tidak hanya menjadi penanda fisik, melainkan juga medium politik yang menegaskan Surabaya sebagai pusat narasi perjuangan bangsa. Selain monumen, peringatan tahunan Hari Pahlawan menjadi salah satu sarana penting dalam menghidupkan identitas kepahlawanan kota. Di Surabaya, peringatan ini dilakukan melalui upacara di Tugu Pahlawan, parade militer, pementasan drama perjuangan, hingga lomba penulisan di sekolah-sekolah.<sup>19</sup>

Identitas kepahlawanan Surabaya juga menjadi daya tarik politik. Partai politik besar seperti PNI, NU, dan PKI, yang memiliki basis kuat di Jawa Timur, kerap menggunakan narasi perjuangan Surabaya sebagai legitimasi moral dalam propaganda mereka.<sup>20</sup> Misalnya, retorika semangat arek Suroboyo dipakai untuk membangkitkan militansi kader partai maupun organisasi massa. Dengan kata lain, memori kepahlawanan Surabaya mengalami proses politisasi yang intens dalam dinamika Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin. Lebih jauh, identitas kepahlawanan juga terwujud dalam kehidupan kultural kota. Seni pertunjukan, sastra, dan media massa lokal kerap menampilkan kisah heroisme arek-arek Surabaya sebagai simbol kebanggaan kolektif.<sup>21</sup> Pementasan drama perjuangan di gedung kesenian, misalnya, menjadi medium

---

<sup>18</sup> Putra, H. S. A. (2001). Remembering, Misremembering and Forgetting: The Struggle over “Serangan Oemoem 1 Maret 1949” in Yogyakarta, Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 29(3), 471-494. <https://doi.org/10.1163/156853101X00208>

<sup>19</sup> Indrawan, A. A. G. A., Sariyatun, S., & Ediyono, S. (2023). Tugu pahlawan sebagai simbol perjuangan arek suroboyo dan urgensinya dalam penguatan pendidikan karakter di era budaya global. *Science, Engineering, Education, and Development Studies (SEEDS)*, 6(1). <https://doi.org/10.20961/seeds.v6i1.72385>

<sup>20</sup> Paty, P. B. (2023). *R. A. Kartini and the many faces of colonial female subject* (hlm. 143-157). Routledge eBooks. <https://doi.org/10.4324/9781003270102-15>

<sup>21</sup> Anwar, M. S., & Astuti, S. B. (2017). *Heroisme di Kota Surabaya dalam Puisi Indonesia Pascakolonial*. 20(2), 181-196. <https://doi.org/10.24257/ATAVISME.V20I2.383.181-196>

populer yang menghadirkan kembali narasi 10 November ke ruang publik. Identitas ini kemudian membentuk habitus sosial masyarakat Surabaya yang bangga dengan keberanian, perlawanan, dan solidaritas.

Pasca-kemerdekaan, pemerintah Indonesia berusaha memperkuat simbol persatuan nasional dengan menghadirkan tokoh pahlawan dalam ruang publik.<sup>22</sup> Surabaya, yang sejak awal memiliki tradisi memperingati heroisme 10 November, menyerap semangat tersebut dengan menambahkan dimensi perempuan melalui sosok Kartini. Kartini dipandang sebagai pelengkap identitas kepahlawanan kota: jika 10 November melambangkan keberanian fisik dan militansi arek-arek Suroboyo, maka Hari Kartini menghadirkan gagasan tentang perjuangan intelektual, pendidikan, dan emansipasi perempuan.

Dalam praktiknya, perayaan Hari Kartini di Surabaya pada 1950-1965 seringkali dikaitkan dengan semangat kepahlawanan lokal. Sekolah-sekolah, misalnya, mengadakan lomba pidato tentang perjuangan Kartini dengan menghubungkannya pada semangat perjuangan rakyat Surabaya. Arsip lokal menunjukkan bahwa banyak pementasan drama di sekolah dan gedung kesenian Surabaya yang menampilkan kisah hidup Kartini tidak hanya sebagai perempuan Jawa, tetapi juga sebagai pahlawan nasional yang sejalan dengan semangat 10 November. Dengan demikian, identitas heroik Surabaya diperluas: kepahlawanan tidak hanya milik laki-laki pejuang bersenjata, tetapi juga perempuan yang berjuang di ranah pendidikan dan kebudayaan. Organisasi perempuan di Surabaya, baik yang berafiliasi dengan NU, PNI, maupun PKI, memanfaatkan Hari Kartini untuk menegaskan peran perempuan dalam pembangunan bangsa.<sup>23</sup> Bagi mereka, Kartini tidak sekadar simbol budaya Jawa, tetapi juga tokoh perjuangan yang menegaskan bahwa perempuan Surabaya memiliki tanggung jawab historis untuk meneruskan semangat kepahlawanan. Dalam orasi dan publikasi, sering muncul ungkapan bahwa

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Rutherford, D. (1993). *Unpacking a National Heroine: Two Kartinis and Their People*. 55, 23. <https://doi.org/10.2307/3351085>

perempuan Surabaya harus “mewarisi keberanian Kartini” sebagaimana *arek-arek Suroboyo* mewarisi keberanian 10 November. Hubungan antara identitas kepahlawanan Surabaya dan perayaan Hari Kartini ini juga memperlihatkan dinamika menarik. Di satu sisi, negara melalui sekolah dan birokrasi daerah berusaha menstandarkan perayaan Kartini sebagai agenda nasional. Namun di sisi lain, masyarakat Surabaya mengartikulasikan Kartini dengan cara yang khas, yaitu dengan mem-bingkainya dalam tradisi heroik lokal. Hal ini memperlihatkan adanya dialektika antara narasi nasional dan lokal dalam memori kolektif Surabaya.

## 2.2 Dinamika Sosial dan Politik Perempuan Surabaya

Pasca-kemerdekaan, Surabaya tidak lagi hanya dikenal sebagai kota perlawanan bersenjata yang heroiknya melegenda sejak 10 November 1945. Surabaya memasuki fase baru, ketika denyut revolusi tidak lagi berderak di medan tempur, tetapi berpindah ke ruang sosial, pendidikan, dan politik.<sup>24</sup> Di ruang-ruang itulah perempuan Surabaya mulai menemukan ekspresinya. Mereka tidak lagi hanya dipandang sebagai pengatur rumah tangga, melainkan aktor penting yang ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Semangat revolusi yang masih membara, ditambah tuntutan pembangunan negara muda, memberi energi bagi lahirnya gerakan perempuan dengan wajah yang beragam.

Selain itu, gelombang demokratisasi pasca pengakuan kedaulatan mendorong lahirnya partai-partai politik yang segera membentuk sayap organisasi perempuan. Hal ini menciptakan situasi baru: perempuan Surabaya tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi aktor dalam percaturan politik lokal maupun nasional. Di tengah dinamika tersebut, beberapa organisasi perempuan tampil dominan. Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), yang berkembang pesat sejak awal 1950-an, mengusung ide kesetaraan gender dengan bingkai revolusi sosial. Di Surabaya, Gerwani aktif

---

<sup>24</sup> Martyn, E. (2004). *The Women's Movement in Postcolonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy*.

mengorganisir demonstrasi buruh perempuan, terutama di sektor pabrik rokok dan tekstil. Arsip harian *Harian Rakjat* dan Utara kita tahun 1960 mencatat bagaimana cabang Gerwani Surabaya mendorong Gerakan anti kolonialisme dan kenaikan upah buruh minyak. Aksi-aksi ini menegaskan bahwa perempuan tidak hanya hadir di panggung domestik, tetapi juga berani melawan ketidakadilan ekonomi melalui jalur politik massa.



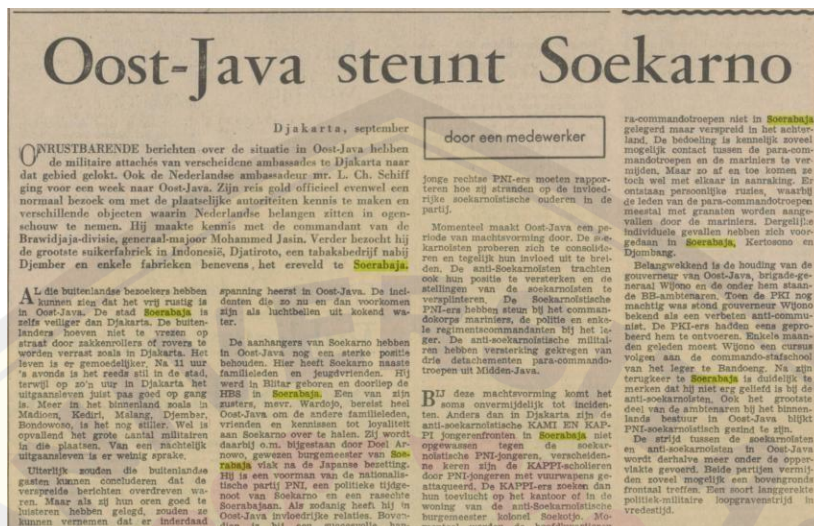
Gambar 2.2 Slogan Rotterdam *Harian Rakjat* Soerabaja dan utara kita 1960

Di sisi lain, Muslimat NU menjadi representasi gerakan perempuan berbasis religius. Berakar kuat di Surabaya yang dikenal sebagai kota santri sekaligus kota pelabuhan, Muslimat NU menekankan pentingnya moralitas, pendidikan keluarga, dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan bangsa. Kongres Muslimat NU di Surabaya tahun 1954, sebagaimana dicatat dalam laporan *Berita Nahdlatul Ulama*, membahas isu poligami, pendidikan anak, hingga peran perempuan dalam mempertahankan moralitas bangsa di tengah arus modernisasi. Bagi kalangan santri, Muslimat NU menawarkan ruang aman untuk berpolitik tanpa meninggalkan identitas religius.<sup>25</sup>

Sementara itu, Wanita PNI menjadi kekuatan politik nasionalis yang berafiliasi langsung dengan PNI sebagai partai penguasa. Organisasi ini berperan aktif dalam menggalang massa perempuan di Surabaya, terutama di kawasan perkotaan dan lingkungan birokrasi. Dokumentasi rapat umum di

<sup>25</sup> Arnez, M. (2010). Empowering Women Through Islam: Fatayat NU Between Tradition and Change. *Journal of Islamic Studies*, 21(1), 59-88. <https://doi.org/10.1093/JIS/ETP025>

Gedung Negara Grahadi pada awal 1960-an menunjukkan kehadiran tokoh-tokoh Wanita PNI yang mengkampanyekan garis politik Sukarno, termasuk gagasan *Nasakom*. Bagi mereka, perempuan adalah ibu bangsa yang harus mendukung revolusi nasional melalui kesetiaan pada Presiden Sukarno dan perjuangan anti-imperialisme.



Gambar 2.3 Jurnal Perdagangan Umum, Jawa Timur mendukung Soekarno, 1955

Namun, persinggungan antarideologi ini tidak berjalan harmonis, rivalitas politik yang tajam di tingkat nasional turut merembes ke Surabaya.<sup>26</sup> Aksi demonstrasi yang digelar Gerwani, misalnya, kerap dipandang dengan curiga oleh kalangan Muslimat NU yang menganggap gerakan itu terlalu radikal dan bertentangan dengan nilai agama. Sebaliknya, kader Gerwani menilai gerakan perempuan religius hanya membatasi peran perempuan pada ranah domestik dan moralitas. Ketegangan ini semakin nyata ketika Surabaya menjadi salah satu kota penting dalam konsolidasi politik PKI dan organisasi massanya, termasuk Gerwani, yang sering berbenturan wacana dengan organisasi Islam.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Sebastian, L. C., & Alkaff, S. H. B. O. (2024). *Ideologies and Their Importance in Shaping Islam, Muslims, and Activism in Indonesia* (hlm. 71-131). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-981-97-1140-6\\_3](https://doi.org/10.1007/978-981-97-1140-6_3)

<sup>27</sup>D. Rahmanudin. (2023). "Gerwani Sect Soekarno Era Islamic Politics." Dalam *Proceedings of the 5th International Graduate Conference in Islam and Interdisciplinary Studies (IGCIIS 2022), 19-20 October 2022, Mataram, Lombok, Indonesia*. EAI Publisher. <https://doi.org/10.4108/eai.19-10-2022.2331878>

Situasi politik semakin memanas menjelang era Demokrasi Terpimpin. Surabaya yang strategis sebagai kota pelabuhan sekaligus kota pendidikan menjadi ajang perebutan pengaruh. Forum-forum lokal, seperti rapat umum di Balai Pemuda atau diskusi politik di kampus Universitas Airlangga, sering menghadirkan perdebatan terbuka antar organisasi perempuan.<sup>28</sup> Tokoh-tokoh perempuan tampil sebagai orator yang tidak kalah lantang dengan tokoh laki-laki, memperlihatkan transformasi besar dalam peran perempuan di ranah publik.



**Gambar 2.4** Seorang pemimpin/pejabat sedang berpidato pada Kongres Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya dengan berlatar belakang bendera partai PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia adalah salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia. 8 - 9 - 1954, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur.

Menjelang 1965, dinamika politik perempuan di Surabaya mencapai puncaknya. Gerwani semakin kuat posisinya, terutama setelah menggalang massa dalam kampanye dukungan terhadap politik konfrontasi Sukarno terhadap Malaysia. Dalam arsip foto *IPPHOS* tahun 1964, tampak barisan

<sup>28</sup> Arya W. Wirayuda, Peran Partai Masjumi dalam Dinamika Perkembangan Demokrasi di Kota Surabaya 1945-1960, *Jurnal Mozaik Humaniora*

perempuan Gerwani Surabaya ikut dalam demonstrasi anti-Malaysia, membawa poster bertuliskan “Ganyang Nekolim”. Namun, kekuatan ini sekaligus menempatkan mereka dalam posisi rentan, karena setelah peristiwa 30 September 1965, Gerwani menjadi sasaran utama represi politik. Bagi Muslimat NU dan Wanita PNI, periode ini juga menjadi ujian. Muslimat NU memperkuat basisnya di pesantren dan kampung-kampung kota, menjaga jarak dari tuduhan keterlibatan dalam politik radikal. Sementara Wanita PNI berusaha menjaga kesetiaan pada Sukarno, meskipun tidak terhindar dari dampak konflik ideologi yang melanda partai induknya.



Gambar 2.5 Ganyang Malaysia Inisiasi PKI

### 2.3 Ragam Aktivitas dalam Peringatan Hari Kartini di Surabaya

Surabaya pada dekade 1950-an hingga pertengahan 1960-an tidak lagi semata-mata dikenal sebagai kota perlawanan yang heroiknya tercatat dalam sejarah 10 November 1945. Kota ini perlahan memasuki babak baru, ketika denyut revolusi tidak lagi terdengar di medan tempur, tetapi berpindah ke ruang sosial, budaya, dan pendidikan. Sebagai ibu kota Jawa Timur sekaligus kota pelabuhan terbesar di luar Jakarta, Surabaya menjadi ruang penting bagi konsolidasi identitas nasional pasca-kemerdekaan.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Dick, H. (2003). *Surabaya, city of work: a socioeconomic history, 1900-2000*. Singapore University Press. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA56511904>

Dalam konteks sosial-budaya, peringatan Hari Kartini menjadi salah satu arena artikulasi kolektif.<sup>30</sup> Foto-foto karnaval dan gerak jalan menunjukkan bagaimana masyarakat Surabaya memaknai perayaan ini bukan hanya sebagai upacara formal, melainkan sebagai pesta rakyat. Anak-anak, perempuan, dan keluarga menjadi pusat dari perayaan, memperlihatkan bahwa pembangunan bangsa diarahkan pada generasi baru. Gerak jalan kontingen wanita dan karnaval anak-anak yang mengenakan kostum profesi atau binatang menegaskan bahwa nilai-nilai emansipasi tidak dipahami secara abstrak, tetapi dijalankan melalui simbol permainan, hiburan, dan kebersamaan. Selain itu, keberadaan lomba sepeda hias, arena bermain, hingga paduan suara putri memperlihatkan wajah sosial Surabaya yang sedang bertransformasi menjadi kota modern. Di satu sisi, ada semangat untuk bergerak maju dengan menampilkan citra perempuan dan anak-anak sebagai agen perubahan; di sisi lain, masyarakat tetap menjaga rasa kebersamaan melalui kegiatan sederhana yang mengikat komunitas.

Pada saat yang sama, dimensi budaya tradisional tetap dijaga. Pameran seni rupa yang menampilkan karya-karya pelukis lokal menunjukkan adanya dinamika intelektual dan apresiasi terhadap seni sebagai bagian dari modernitas. Iringan gamelan dalam perayaan Hari Kartini menandakan keterhubungan erat antara tradisi Jawa Timur dengan perayaan nasional. Begitu pula pertunjukan tari tradisional di bawah potret besar Raden Ajeng Kartini memperlihatkan perpaduan antara simbol nasional dan lokal, dimana perjuangan Kartini diterjemahkan dalam bahasa budaya yang akrab dengan masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, untuk mengetahui ragam bentuk dan pelaksanaan Hari Kartini, penulis membuat 3 klasifikasi yakni:

---

<sup>30</sup>R. Asmarani. (2017). *Perempuan dalam perspektif kebudayaan. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 12(1), 7-16. <https://doi.org/10.14710/SABDA.V12I1.15249>

### 2.3.1 Kegiatan Karnaval dan Gerak Jalan di Surabaya



**Gambar 2.6** Acara karnaval pada peringatan hari kartini di Surabaya, 21 - 4 - 1953,  
Gerak jalan kontingen wanita pada peringatan Hari Kartini di Surabaya 21 - 4 - 1953

Pada peringatan Hari Kartini di Surabaya, suasana kota tampak begitu hidup. Jalan-jalan utama dipenuhi masyarakat, sebagian besar anak-anak sekolah yang berdiri berkerumun di pinggir jalan. Mereka menanti arak-arakan kendaraan hias yang melintas. Karnaval ini tidak sekadar tontonan hiburan; di atas kendaraan yang dihias, para peserta menampilkan simbol-simbol kemajuan dan semangat pembangunan. Bagi masyarakat kota pasca-kemerdekaan, kendaraan hias itu melambangkan tekad bangsa yang tengah menapaki jalan modernitas. Antusiasme anak-anak yang memadati jalan memberi kesan kuat bahwa generasi muda diarahkan untuk ikut merayakan dan menginternalisasi narasi nasionalisme yang sedang tumbuh.

Di sisi lain, gerak jalan Kartini menampilkan barisan panjang anak-anak perempuan dengan pakaian seragam putih, berjalan tertib dan penuh disiplin. Di bawah terik matahari Surabaya, mereka bergerak seirama, menciptakan harmoni visual yang segera menarik perhatian masyarakat yang menonton. Gerak jalan ini bukan hanya kegiatan olahraga atau parade seremonial belaka, melainkan wujud simbolis dari keterlibatan perempuan dalam ruang publik. Barisan rapi itu seolah menegaskan bahwa perempuan, yang selama ini kerap dikaitkan dengan ranah domestik, kini tampil di jalan raya di ruang publik kota sebagai bagian dari wajah modernitas dan nasionalisme Indonesia.

### 2.3.2 Hiburan Anak-Anak dan Arena Bermain di Surabaya



**Gambar 2.7** Rangkaian Kegiatan Hari Kartini Hiburan Anak dan Arena Bermain: Peringatan Hari Kartini di Surabaya. 21 April 1957. Lomba menghias makanan, Peringatan Hari Kartini di Surabaya. 21 April 1957. Arena bermain anak-anak, Lomba Anak - anak berpakaian profesi berpakaian kelinci, Peringatan Hari Kartini di Surabaya. 21 April 1957. Lomba sepeda hias Anak - anak, Peringatan Hari Kartini di Surabaya. 21 April 1957. Anak - anak berpakaian profesi, Peringatan Hari Kartini di Surabaya. 21 April 1957. Lomba Anak - anak berpakaian profesi berpakaian penjual sate Madura.

Peringatan Hari Kartini di Surabaya pada dekade 1950-an tidak hanya menghadirkan seremoni formal, tetapi juga menjelma sebagai pesta rakyat yang meriah dan sarat makna sosial. Di tengah kerumunan warga yang penuh tawa, tampak seorang anak mengenakan kostum kelinci putih lengkap dengan keranjang kecil di tangannya. Ia berjalan di antara sorak sorai penonton, menghadirkan suasana riang yang memperlihatkan bagaimana dunia anak-anak menjadi bagian penting dari perayaan kebangsaan. Kehadiran kostum semacam ini seakan menghubungkan imajinasi anak-anak dengan pesan moral Kartini tentang masa depan yang lebih cerah. Sementara itu, dalam sudut lain, sekelompok anak berdiri berjajar dengan nomor peserta yang tergantung di dada mereka. Mereka mengenakan pakaian tradisional maupun kostum profesi sederhana, misalnya penjual sate Madura dengan pikulan kecil. Kehadiran kostum tersebut bukan sekadar permainan, melainkan simbol keterhubungan antara identitas lokal dengan narasi nasional. Ia menegaskan bahwa di tengah derasny arus modernisasi, akar budaya dan profesi rakyat masih dijadikan pijakan.

Tidak kalah menarik, suasana juga semakin semarak ketika seorang anak mengendarai sepeda kecil yang dihiasi penuh dengan bunga-bunga. Sepeda hias ini bukan hanya sekedar lomba kreatif, melainkan dapat dibaca sebagai alegori kemajuan bangsa yang dijalankan oleh generasi baru. Hiasan-hiasan bunga menjadi simbol harapan, keceriaan, serta dorongan untuk terus bergerak maju dalam membangun Indonesia yang Merdeka Di sisi lain, perayaan juga memberi ruang bagi kebersamaan keluarga. Sebuah taman kecil dengan ayunan sederhana tampak ramai oleh anak-anak yang bermain, sementara para orang tua mengawasi mereka dengan penuh senyum. Pemandangan ini menunjukkan bahwa Hari Kartini tidak semata menjadi agenda kenegaraan, melainkan juga ruang rekreasi yang mempererat hubungan sosial dan memperkuat ikatan komunitas.

Di dalam ruangan yang lebih formal, suasana berubah menjadi khidmat ketika sekelompok siswi berdiri berbaris rapi menyanyikan lagu di bawah arahan seorang dirigen muda. Paduan suara putri ini menambah dimensi simbolik dari perayaan, menghadirkan nuansa nasionalisme yang berpadu dengan harapan bagi masa depan

bangsa. Suara perempuan muda yang bersatu dalam harmoni musik seolah menegaskan posisi mereka sebagai agen perubahan yang tak bisa lagi diabaikan. Dengan demikian, melalui lomba kostum, sepeda hias, arena bermain, hingga paduan suara, perayaan Hari Kartini di Surabaya menghadirkan wajah kebudayaan pasca-kemerdekaan yang berlapis. Ia memadukan hiburan dan pendidikan, tradisi dan modernitas, serta menegaskan bahwa anak-anak dan perempuan muda menjadi pusat simbolik bagi harapan bangsa.

### 2.3.3 Seni Pertunjukan dan Budaya di Surabaya



**Gambar 2.8** Ragam Seni dan Pertunjukan di Hari Kartini: Tari-tarian janger surabaya yang dibawakan oleh anak-anak sekolah pada acara peringatan hari kartini di surabaya, 21 - 4 - 1953, Seperangkat gamelan sedang dimainkan oleh para NIYAGA pada peringatan hari kartini di Surabaya, 21 - 4 - 1953, Pertunjukan wayang Potehy, Peringatan Hari Kartini di Surabaya. 21 April 1957, Pameran kerajinan tangan dalam peringatan hari kartini di Surabaya, 21 - 4 - 1953, Pameran lukisan dalam peringatan hari kartini di Surabaya, 21 - 4 - 1953

Peringatan Hari Kartini di Surabaya tidak hanya diwarnai oleh lomba anak-anak dan karnaval jalanan, tetapi juga diperkaya dengan berbagai bentuk seni pertunjukan dan ekspresi budaya. Di sebuah ruangan yang sederhana namun sarat makna, tampak pameran karya seni rupa digelar. Lukisan-lukisan dipajang rapi di dinding, sementara para pengunjung, baik laki-laki maupun perempuan, terlihat antusias berdiskusi. Suasana ini memperlihatkan bahwa peringatan Kartini bukan hanya ruang hiburan, tetapi juga wadah intelektual di mana seni dijadikan medium refleksi sosial.

Di sisi lain, alunan gamelan mengisi ruang dengan harmoni khas Jawa Timur. Para penabuh, dengan penuh kesungguhan, memainkan instrumen tradisional seperti bonang, gong, dan kendang. Irama gamelan yang mengalun menciptakan suasana khidmat sekaligus meriah, seakan mengikat perayaan Kartini dengan akar budaya lokal yang tetap dijaga di tengah modernisasi. Kehadiran gamelan menegaskan bahwa perayaan ini bukan hanya mengadopsi simbol nasional, tetapi juga merawat tradisi daerah sebagai bagian dari identitas bangsa. Pertunjukan tari juga turut memperindah acara.

Dalam salah satu momen, beberapa perempuan tampil menari dengan mengenakan busana tradisional lengkap, dipentaskan di hadapan sebuah panggung yang dihiasi foto besar Raden Ajeng Kartini. Kehadiran gambar Kartini di latar belakang memberi makna simbolik: bahwa tarian bukan hanya hiburan estetis, melainkan penghormatan kepada tokoh yang dijadikan ikon perjuangan perempuan Indonesia. Dengan demikian, seni pertunjukan dan budaya yang hadir dalam perayaan Hari Kartini di Surabaya berfungsi ganda. Ia sekaligus menjadi sarana hiburan kolektif, penguat identitas lokal, dan medium politik simbolik yang menautkan gagasan emansipasi Kartini dengan kehidupan masyarakat urban pasca-kemerdekaan. Perpaduan antara pameran seni rupa, gamelan, dan tari tradisional menunjukkan bahwa perayaan Kartini adalah ruang kultural yang menyatukan seni, tradisi, dan nasionalisme dalam satu bingkai.

### 2.3.4 Peringatan Hari Kartini di Kota Lain



**Gambar 2.9** Ketua Rukun Wanita Kapanewon Tempel, Ibu Panewu sedang membuka acara dalam rangka Peringatan Hari Kartini dan Sekelompok pemuda sedang menyanyi Lagu Ibu Kita Kartini dalam acara Peringatan Hari Kartini 21 April 1957 di Yogyakarta.

Foto ini memperlihatkan suasana peringatan Hari Kartini di Yogyakarta yang berlangsung dalam ruang pertemuan sederhana. Tampak seorang perempuan berdiri di bagian depan ruangan, diduga Ketua Rukun Wanita Kapanewon Tempel sekaligus Ibu Panewu, sedang membuka acara di hadapan para peserta yang mayoritas merupakan kaum perempuan. Di belakangnya terlihat papan tulis dengan tulisan acara, sementara para hadirin duduk rapi di bangku kayu sambil memperhatikan jalannya pembukaan kegiatan.

Suasana dalam gambar menunjukkan bentuk peringatan Hari Kartini yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga edukatif dan organisatoris. Kehadiran perempuan sebagai pemimpin acara mencerminkan perubahan posisi perempuan dalam masyarakat pasca-kemerdekaan. Jika pada masa sebelumnya perempuan lebih banyak ditempatkan di ruang domestik, maka dalam kegiatan seperti ini mereka mulai tampil sebagai penggerak organisasi sosial dan pendidikan di tingkat lokal.

Ruang pertemuan yang menyerupai kelas atau balai pendidikan juga memberi makna simbolik bahwa semangat Kartini dipahami melalui jalur pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Para peserta yang berkumpul menunjukkan adanya solidaritas perempuan dalam membangun kesadaran kolektif mengenai peran mereka di masyarakat. Dengan demikian, arsip ini merepresentasikan Hari Kartini sebagai momentum yang menegaskan keterlibatan perempuan dalam ruang publik, khususnya melalui organisasi kewanitaan di Yogyakarta.

Kemudian, foto bagian bawah memperlihatkan suasana peringatan Hari Kartini yang berlangsung dalam ruang pertemuan sederhana di Yogyakarta. Tampak sekelompok pemuda berdiri di bagian depan ruangan sambil menyanyikan lagu “Ibu Kita Kartini” di hadapan para peserta yang duduk menyaksikan jalannya acara. Beberapa perempuan dewasa terlihat memperhatikan penampilan tersebut dengan penuh perhatian, sementara suasana ruangan mencerminkan kegiatan yang bersifat formal namun akrab.

Penampilan paduan suara ini bukan sekadar hiburan dalam peringatan seremonial, melainkan menjadi simbol penghormatan terhadap gagasan emansipasi perempuan yang diwariskan oleh Kartini. Lagu “Ibu Kita Kartini” sendiri pada masa pasca-kemerdekaan telah menjadi medium penting dalam membangun ingatan kolektif tentang perempuan Indonesia yang berpendidikan, berdaya, dan memiliki peran dalam kehidupan bangsa. Kehadiran para pemuda yang tampil di depan umum menunjukkan bagaimana generasi muda perempuan mulai diarahkan untuk aktif dalam ruang sosial dan budaya.

Di sisi lain, ruang pertemuan yang menyerupai kelas atau balai pendidikan memberi kesan bahwa peringatan Hari Kartini erat dikaitkan dengan pendidikan dan pembentukan kesadaran perempuan. Melalui kegiatan menyanyi bersama, nilai nasionalisme dan semangat modernitas diperkenalkan secara kolektif kepada masyarakat. Arsip ini dengan demikian merepresentasikan Hari Kartini sebagai ruang simbolik yang memperlihatkan keterlibatan perempuan muda dalam budaya publik sekaligus peneguhan identitas perempuan Indonesia pada masa awal pembangunan nasional.



**Gambar 2.10** Suasana exposisi kerajinan tangan pada waktu acara Peringatan Hari Kartini, tampak para ibu-ibu sangat antusias mengikutinya dan Para pengurus dan anggota Rukun Wanita Kapanewon Tempel foto bersama di depan Pendopo Kapanewon Tempel usai Peringatan Hari Kartini di Yogyakarta 21 April 1957

Disisi lain, terdapat foto yang memperlihatkan suasana exposisi kerajinan tangan dalam rangka peringatan Hari Kartini yang berlangsung dengan penuh antusiasme. Tampak deretan meja panjang dipenuhi berbagai hasil kerajinan, sementara para ibu dan anak-anak berdiri mengelilinginya sambil mengamati setiap karya yang dipamerkan. Kehadiran banyak perempuan dengan pakaian rapi dan ekspresi penuh perhatian menunjukkan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu pusat perhatian dalam perayaan tersebut.

Exposisi kerajinan tangan ini tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan pameran biasa, tetapi juga merepresentasikan peran perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui hasil kerajinan yang dipamerkan, perempuan diperlihatkan sebagai sosok yang memiliki keterampilan, kreativitas, dan kemampuan produktif. Dalam konteks peringatan Hari Kartini, kegiatan semacam ini menjadi simbol bahwa emansipasi perempuan tidak hanya diwujudkan melalui pendidikan, tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam bidang ekonomi rumah tangga dan industri kerajinan lokal.

Antusiasme para ibu yang memenuhi ruang pameran memperlihatkan adanya ruang publik yang semakin terbuka bagi perempuan pada masa pasca-kemerdekaan. Mereka tidak lagi hanya menjadi penonton dalam kehidupan sosial, melainkan turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan komunitas dan kebudayaan. Sementara kehadiran anak-anak di sekitar area pameran memberi kesan bahwa nilai-nilai keterampilan, kemandirian, dan semangat Kartini diwariskan kepada generasi berikutnya. Arsip ini dengan demikian menggambarkan Hari Kartini sebagai momentum yang mempertemukan gagasan modernitas perempuan dengan kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Kemudian, Foto yang memperlihatkan para pengurus dan anggota Rukun Wanita Kapanewon Tempel yang berfoto bersama di depan Pendopo Kapanewon Tempel setelah rangkaian peringatan Hari Kartini selesai dilaksanakan.

Dalam gambar tampak puluhan perempuan berdiri berjajar dengan pakaian yang sederhana namun rapi, sebagian membawa anak kecil, sementara di bagian tengah terlihat papan bertuliskan peringatan Hari Kartini beserta identitas organisasi Rukun Wanita Tempel. Latar pepohonan dan halaman pendopo menghadirkan suasana yang hangat dan bersifat komunal.

Foto bersama ini bukan sekadar dokumentasi penutup acara, melainkan simbol kebersamaan dan solidaritas perempuan dalam organisasi sosial tingkat lokal. Kehadiran Rukun Wanita menunjukkan bahwa perempuan pada masa itu mulai terorganisasi dalam wadah-wadah sosial yang memberi ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Hari Kartini, organisasi perempuan semacam ini merepresentasikan semangat emansipasi yang diterjemahkan ke dalam aktivitas kolektif, pendidikan sosial, dan penguatan peran perempuan di lingkungan komunitas.

Pendopo Kapanewon sebagai lokasi pengambilan gambar juga memiliki makna simbolik tersendiri. Ruang tersebut merupakan pusat aktivitas pemerintahan dan masyarakat lokal, sehingga kehadiran perempuan di halaman pendopo menunjukkan semakin terbukanya akses perempuan terhadap ruang publik. Selain itu, keterlibatan ibu-ibu bersama anak-anak dalam foto ini memperlihatkan kesinambungan generasi, bahwa nilai perjuangan Kartini diwariskan tidak hanya melalui pidato atau upacara, tetapi juga melalui pengalaman sosial bersama dalam kehidupan sehari-hari.



**Gambar 2.11** Kartini-dag in Bandung 1953

Arsip berjudul *Kartini-dag in Bandung* ini memperlihatkan suasana peringatan Hari Kartini di Bandung pada masa kolonial akhir atau awal masa peralihan menuju Indonesia modern. Pada bagian atas halaman tampak sekelompok siswi sekolah menengar berdiri berjajar di depan bangunan sekolah dengan pakaian seragam yang rapi. Kehadiran para pelajar perempuan dalam posisi formal seperti ini menunjukkan bahwa pendidikan bagi perempuan mulai memperoleh tempat penting dalam

masyarakat perkotaan Hindia Belanda.

Teks dalam arsip menjelaskan bahwa para pelajar sekolah menengah di Bandung menyelenggarakan peringatan Hari Kartini melalui berbagai pertunjukan seni dan kegiatan budaya. Lagu-lagu nasional dipadukan dengan musik gamelan, tarian tradisional, pembacaan kisah kehidupan Kartini, hingga pementasan drama tentang perjuangan Kartini memperoleh pendidikan. Seluruh rangkaian acara tersebut memperlihatkan bagaimana sosok Kartini dijadikan simbol perempuan terdidik sekaligus lambang kemajuan bangsa.

Pementasan drama dan pembacaan kisah Kartini memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar hiburan sekolah. Melalui pertunjukan itu, generasi muda perempuan diajak memahami pengalaman Kartini sebagai tokoh yang melawan keterbatasan tradisi dan memperjuangkan akses pendidikan bagi perempuan pribumi. Narasi tersebut secara tidak langsung membangun kesadaran baru bahwa perempuan memiliki hak untuk hadir dalam dunia pendidikan dan kehidupan publik. Di sisi lain, perpaduan antara budaya tradisional Jawa seperti gamelan dan tarian dengan semangat pendidikan modern menunjukkan adanya proses negosiasi identitas budaya pada masa itu. Hari Kartini diperingati bukan dengan meninggalkan tradisi, melainkan dengan menggabungkan nilai kebudayaan lokal dan gagasan modernitas. Hal ini mencerminkan bagaimana nasionalisme Indonesia mulai dibangun melalui pendidikan, seni, dan partisipasi perempuan muda di ruang publik.

Arsip ini dengan demikian merepresentasikan Hari Kartini sebagai momentum pembentukan identitas perempuan modern di Indonesia. Sosok pelajar perempuan yang tampil di depan sekolah menegaskan bahwa perempuan tidak lagi diposisikan semata dalam ranah domestik, tetapi mulai dipandang sebagai bagian penting dari masa depan bangsa melalui pendidikan, organisasi, dan keterlibatan budaya.

### BAB 3. KONSTRUKSI SIMBOL KEBUDAYAAN PEREMPUAN DALAM PERINGATAN HARI KARTINI (1950-1965)

Bab ini menjawab rumusan masalah kedua dengan menelaah simbolisasi kebudayaan perempuan dalam acara Hari Kartini, termasuk pakaian adat, narasi pidato, peran seni dan sastra.

#### 3.1 Representasi Kartini dalam Simbol dan Upacara di Surabaya

Sejalan dengan instruksi Bersama Panitia Perayaan Nasional dan Front Nasional” (1965) yang salah satu butirnya berisi “Segala peringatan dan upacara nasional harus menggambarkan semangat Revolusi Nasional yang belum selesai, melibatkan rakyat buruh dan tani, dan berporos pada Nasakom sebagai dasar politik negara”<sup>31</sup> Oleh karena itu, Perayaan Hari Kartini di Surabaya pada periode 1950-1965 menjadi medium penting dalam membangun simbol kebudayaan perempuan Indonesia. Kartini tidak hanya dikenang sebagai tokoh historis, tetapi juga diproduksi ulang melalui berbagai praktik simbolik yang mengisi ruang-ruang upacara, pementasan seni, hingga lomba-lomba rakyat. Dengan demikian, peringatan Hari Kartini dapat dipahami sebagai ajang konstruksi makna, di mana identitas perempuan, nasionalisme, dan tradisi lokal berkelindan.

Salah satu bentuk representasi yang paling menonjol adalah penggunaan pakaian adat. Dalam lomba-lomba busana dan karnaval yang digelar di jalan-jalan Surabaya, anak-anak perempuan tampil mengenakan kebaya, kain batik, hingga busana tradisional dari berbagai daerah. Pakaian adat ini berfungsi ganda: di satu sisi memperlihatkan keragaman budaya Nusantara yang dipersatukan dalam bingkai nasionalisme, sementara di sisi lain meneguhkan citra perempuan sebagai penjaga tradisi.<sup>32</sup>

Foto-foto peringatan Hari Kartini di Surabaya menyingkap bahwa acara ini berfungsi sebagai ritual sosial yang mengejawantahkan Instruksi Bersama Panitia

---

<sup>31</sup> Instruksi Bersama Panitia Perayaan Nasional dan Front Nasional” (1965)

<sup>32</sup> A. Sachari, A. Haldani, & Y. Y. Sunarya. (2018). *Identity shift on traditional clothes for women in Tuban, East Java, Indonesia*. Dalam *Proceedings of the 3rd International Conference on Creative Media, Design and Technology (REKA 2017)*, 4, 252-256. <https://doi.org/10.2991/BCM-17.2018.48>

Perayaan Nasional dan Front Nasional.<sup>33</sup> Karnaval dan gerak jalan yang melibatkan perempuan dan anak-anak, kita melihat simbol keteraturan sosial. Barisan peserta yang berderap rapi di jalan raya menunjukkan penegasan kolektif bahwa perempuan hadir di ruang publik, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai aktor yang mengisi panggung kebangsaan. Dengan menggunakan kacamata Geertz, gerak jalan ini dapat dibaca sebagai representasi keteraturan dan disiplin yang diidealkan bangsa muda. Sebab, Geertz menekankan bahwa kebudayaan adalah *webs of significance* atau jalinan makna yang dipintal manusia dan harus ditafsirkan secara mendalam *thick description*.<sup>34</sup> Dalam ritual-ritual publik, masyarakat berbicara kepada dirinya sendiri tentang dirinya sendiri, yakni merefleksikan identitas dan nilai yang mereka junjung

Foto anak-anak dengan kostum kelinci, profesi, hingga sepeda hias, menampilkan simbol permainan yang sederhana tetapi kuat. Menurut Geertz, simbol kultural seringkali hadir dalam bentuk keseharian yang menyelipkan makna mendalam.<sup>35</sup> Kostum profesi anak-anak menandakan bayangan masa depan: perempuan tidak lagi dibatasi dalam ranah domestik, melainkan diproyeksikan untuk terjun dalam profesi-profesi publik. Sepeda hias, dengan ornamen bunga-bunga, adalah alegori kemajuan bangsa bergerak maju dengan keceriaan kolektif.

Pada ranah seni pertunjukan, foto-foto pementasan tari di depan potret besar Kartini, lantunan gamelan, hingga pameran seni rupa adalah ritual simbolik yang memadukan tradisi dengan nasionalisme. Menurut Geertz, ritual berfungsi memadukan *worldview* (pandangan dunia) dan *ethos* (rasa hidup masyarakat). Potret Kartini di latar belakang tari tradisional adalah *worldview* tentang Kartini sebagai simbol nasional; sedangkan tarian dan gamelan adalah *ethos* Jawa Timur yang penuh harmoni dan religiusitas. Dengan memadukannya, masyarakat Surabaya membangun simbol bahwa emansipasi perempuan tidak bertentangan dengan tradisi, melainkan sejalan dengan nilai budaya lokal.

<sup>33</sup> Instruksi Bersama Panitia Perayaan Nasional dan Front Nasional” (1965)

<sup>34</sup> Geertz, C. (1973). Tafsir Kebudayaan, Penerbit Kansius, hlm 5.

<sup>35</sup> Ibid, hlm 15

Foto paduan suara siswi perempuan memberi representasi simbolik lain. Dalam harmoni suara yang terlatih, kita membaca makna kolektif tentang keteraturan, kerja sama, dan keindahan bersama. Bagi Geertz, simbol musik seperti ini bukan sekadar bunyi, tetapi ekspresi nilai sosial yang disepakati bersama.<sup>36</sup> Kehadiran perempuan muda sebagai pusat pertunjukan menegaskan bahwa mereka diposisikan sebagai suara masa depan bangsa. Lebih jauh, peran seni dan sastra turut memperkuat konstruksi simbol Kartini. Pementasan tari tradisional di hadapan potret besar Kartini, lantunan paduan suara putri, hingga iringan gamelan dalam upacara resmi menunjukkan bagaimana seni dipakai sebagai instrumen representasi. Seni pertunjukan bukan hanya hiburan, melainkan sarana untuk mematerialkan gagasan tentang perempuan ideal: anggun, berpendidikan, sekaligus berakar pada tradisi. Demikian pula drama yang dipentaskan di Balai Pemuda Surabaya pada 1960 menggambarkan kisah perjuangan Kartini, memperlihatkan bagaimana narasi sejarah dipertemukan dengan ekspresi kultural masyarakat kota.

Representasi simbolik itu semakin kuat dengan adanya peran anak-anak dalam perayaan. Kehadiran lomba sepeda hias, kostum profesi, dan arena bermain menandakan bahwa Kartini tidak hanya dimaknai sebagai tokoh masa lalu, tetapi juga proyeksi masa depan. Anak-anak, terutama perempuan, dijadikan simbol generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita emansipasi. Dengan demikian, peringatan Hari Kartini membangun jembatan simbolik antara sejarah, kebudayaan, dan visi pembangunan bangsa. Dengan kata lain, representasi Kartini dalam simbol dan upacara di Surabaya memperlihatkan bagaimana peringatan ini menjadi ruang kultural yang sarat makna. Ia bukan sekadar mengenang seorang tokoh, melainkan juga sarana bagi negara, organisasi perempuan, dan masyarakat untuk menegosiasikan gagasan tentang peran perempuan dalam bangsa yang baru merdeka.

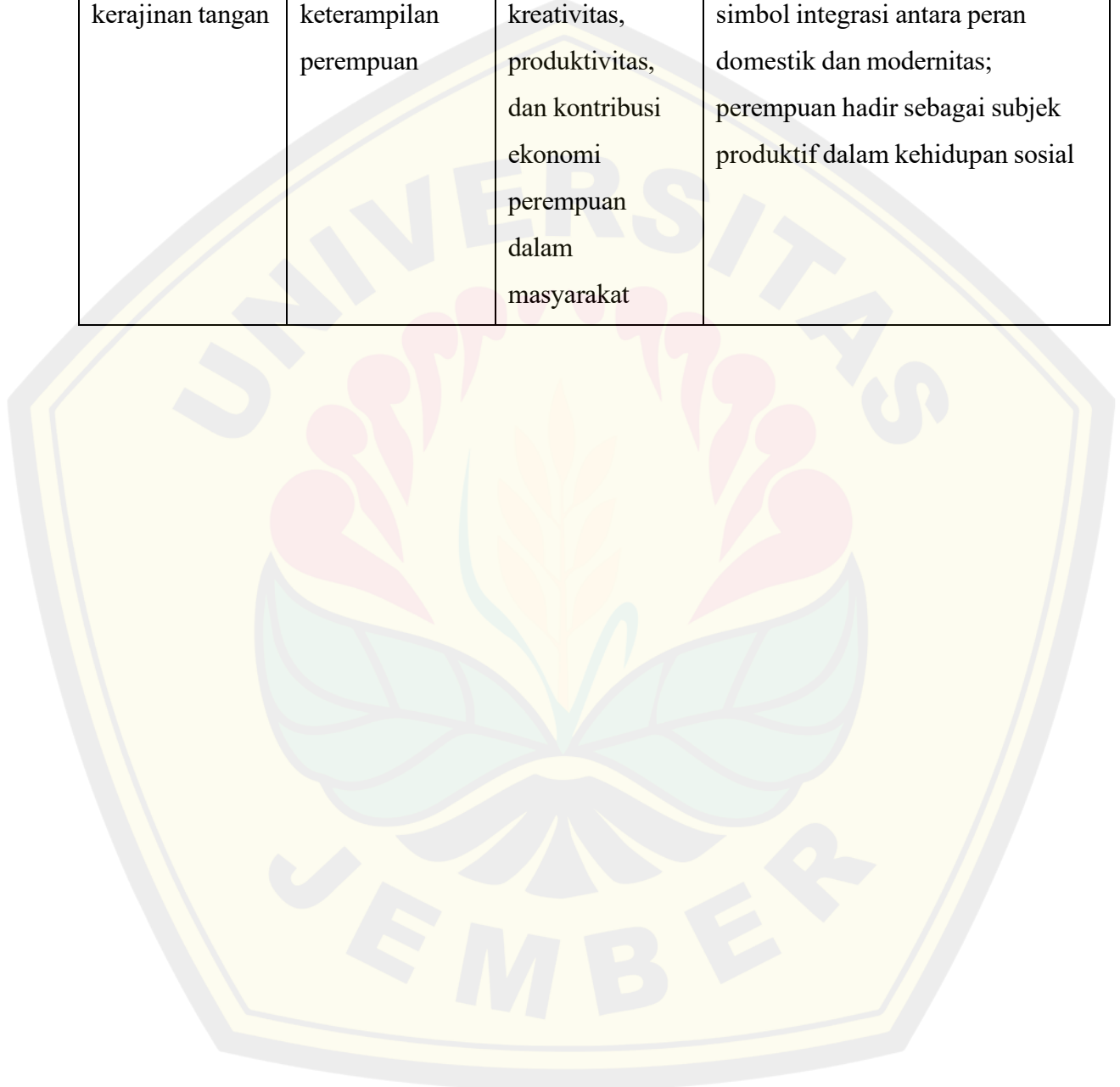
---

<sup>36</sup> Ibid, hlm 15

**Tabel 3.1** Ringkasan Tafsir Clifford Geertz

Foto/Peristiwa	Simbol Utama	Makna Sosial-Budaya	Tafsir Clifford Geertz
Karnaval kendaraan hias Hari Kartini di Surabaya	Kendaraan hias dan arak-arakan publik	Menunjukkan semangat pembangunan, modernitas, dan nasionalisme pasca-kemerdekaan yang diperkenalkan kepada masyarakat, terutama generasi muda	Karnaval menjadi sistem simbol yang “berbicara” tentang cita-cita bangsa modern; ruang publik digunakan untuk menanamkan worldview nasionalisme kepada masyarakat
Gerak jalan Kartini dengan barisan anak perempuan berseragam putih	Disiplin, keseragaman, dan keteraturan tubuh perempuan	Menegaskan keterlibatan perempuan dalam ruang publik serta pembentukan identitas perempuan modern Indonesia	Praktik simbolik ini mencerminkan ethos keteraturan, disiplin, dan nasionalisme; perempuan diposisikan sebagai bagian aktif dari konstruksi bangsa
Ketua Rukun Wanita membuka acara Hari Kartini	Perempuan sebagai pemimpin organisasi	Menunjukkan meningkatnya peran perempuan dalam organisasi sosial dan pendidikan masyarakat	Kepemimpinan perempuan menjadi simbol perubahan struktur sosial; perempuan tidak lagi terbatas pada ranah domestik

Paduan suara lagu “Ibu Kita Kartini”	Harmoni suara kolektif	Menanamkan semangat emansipasi, nasionalisme, dan solidaritas perempuan muda	Lagu dan paduan suara menjadi “bahasa simbolik” yang membangun kesadaran kolektif mengenai perempuan modern dan masa depan bangsa
Exposisi kerajinan tangan	Hasil karya dan keterampilan perempuan	Menunjukkan kreativitas, produktivitas, dan kontribusi ekonomi perempuan dalam masyarakat	Kerajinan dipahami sebagai simbol integrasi antara peran domestik dan modernitas; perempuan hadir sebagai subjek produktif dalam kehidupan sosial



### 3.2 Simbolisme Busana dan Tarian di Surabaya

Dalam peringatan Hari Kartini di Surabaya pada periode 1950-1965, busana dan tarian memegang peran sentral sebagai instrumen representasi kultural. Pakaian adat yang dikenakan dalam karnaval, lomba busana, maupun pementasan tari bukan sekadar pilihan estetika, tetapi simbol yang sarat makna.<sup>37</sup> Busana tradisional seperti kebaya, kain batik, dan atribut daerah lainnya berfungsi ganda: di satu sisi memperlihatkan keragaman budaya Nusantara yang dipersatukan dalam bingkai nasionalisme untuk memenuhi Instruksi Bersama Panitia Perayaan Nasional dan Front Nasional. Di sisi lain penggunaan kebaya oleh perempuan Surabaya juga menegaskan identitasnya sebagai bagian dari bangsa yang modern tanpa kehilangan akar budaya. Selain arsip berupa foto yang telah penulis cantumkan di pembahasan sebelumnya, terdapat arsip berupa surat kabar tentang adanya hari Kartini berasal dari *De vrije pers* pada 21 April 1949 yang mendukung adanya bentuk-bentuk perayaan tersebut



**Gambar 3.1** *De vrije pers* : ochtendbulletin, *De Vrije Pers*, Soerabaia 21 April 1949,

Berdasarkan Instruksi Bersama Menteri/Sekretaris Negara/Ketua Panitia Penyelenggaraan Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia dan Pengurus Besar Front

<sup>37</sup> Crane et al., (2004) 120 Personalisation and identity in fashion, *Journal of Fashion Marketing*,

Nasional, Tahun 1965 yang berisi instruksi untuk mengintegrasikan nilai Nasakom dalam setiap kegiatan perayaan nasional, menggunakan simbol-simbol revolusi (buruh, tani, tentara, dan pemuda) sebagai ikon visual dalam parade, pidato, dan poster, menjadikan setiap perayaan sebagai sarana pendidikan politik rakyat, bukan sekadar seremoni budaya, menyatukan organisasi-organisasi massa (termasuk perempuan) di bawah koordinasi Front Nasional.<sup>38</sup>

Tarian yang dipentaskan dalam perayaan Hari Kartini di panggung-panggung publik, termasuk di Balai Pemuda Surabaya, seringkali diiringi dengan potret besar Raden Ajeng Kartini. Posisi Kartini sebagai latar visual memberi makna simbolik: bahwa setiap gerakan tari bukan hanya ekspresi seni, tetapi juga penghormatan kepada figur nasional yang dijadikan teladan emansipasi. Kehadiran tari tradisional dalam perayaan nasional juga memperlihatkan dialektika antara lokalitas dan nasionalisme bahwa semangat perjuangan perempuan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan lokal yang melahirkannya. Dalam perspektif Clifford Geertz, busana dan tarian dalam perayaan Hari Kartini dapat dibaca sebagai simbol kultural yang menghubungkan ethos dan *worldview* masyarakat.<sup>39</sup> Kebaya dan batik bukan sekadar kain, melainkan tanda visual dari keterikatan perempuan pada nilai moral, kesalehan, dan keanggunan yang dihargai masyarakat Jawa. Sementara itu, tarian di ruang publik menjadi ritual simbolik yang mempertemukan pandangan dunia tentang Kartini sebagai tokoh nasional dengan ethos masyarakat Surabaya yang menekankan harmoni, disiplin, dan solidaritas. Ritual ini, dengan demikian, tidak hanya memamerkan keindahan, melainkan juga mematerialkan cita-cita kebangsaan melalui tubuh perempuan.

Busana dan tarian dalam perayaan Hari Kartini juga mencerminkan upaya negara dan organisasi perempuan untuk menegosiasikan peran perempuan di ruang publik. Bagi Muslimat NU, busana tradisional memberi batasan moral yang jelas bagi perempuan modern. Bagi Gerwani, tarian dan pementasan dipakai sebagai arena menyuarakan ide kesetaraan dan kebebasan berekspresi. Sementara

---

<sup>38</sup> Instruksi Bersama Menteri/Sekretaris Negara/Ketua Panitia Penyelenggaraan Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia dan Pengurus Besar Front Nasional, Tahun 1965.

<sup>39</sup> Geertz, C. (1973). Tafsir Kebudayaan, Penerbit Kansius hlm. 13

organisasi perempuan PNI menempatkan busana adat dan tarian dalam kerangka pembangunan nasional, sebagai simbol keselarasan antara kebudayaan dan politik revolusi. Selaras dengan pendapat Blackburn, yakni *In strongly Islamic circles there was an especially self-righteous culture of denial. People were slow to recognise that shame had kept these things hidden from public view. Violence against women has been connected to sexuality, which has been a taboo subject. Domestic violence was regarded as a private matter, not to be discussed with others. Rape casts a slur not only on the victim but also on her family. There is a common tendency for rape victims to inter-nalise the problem, to regard it as somehow their own fault. Violated women are reduced to their most humiliated state: they do not wish their light to be made public, hoping to preserve at least some scrap of dignity. Women have had no concept of rights against such violence. The problem is seen also in media discussions of violence against women.*<sup>40</sup>

Selain itu, penggunaan busana adat dan pementasan tari dalam peringatan Hari Kartini membawa dampak yang signifikan bagi konstruksi peran perempuan di Surabaya karena dapat terjadi simbolisme busana adat, terutama kebaya dan batik, meneguhkan citra perempuan sebagai penjaga tradisi dan moralitas bangsa. Di satu sisi, hal ini memberikan legitimasi sosial bagi perempuan untuk tampil di ruang publik, karena mereka dianggap masih memegang teguh nilai kesopanan dan religiositas.

Sejalan dengan itu, Saskia E. Wieringa melihat bahwa organisasi perempuan di Surabaya tidak hanya menggunakan peringatan Kartini sebagai momentum kultural, tetapi juga sebagai ruang artikulasi politik. Menurut Wieringa, baik Muslimat NU, Gerwani, maupun PNI menafsirkan simbol-simbol kebudayaan sesuai ideologi mereka masing-masing: Muslimat mengaitkannya dengan religiusitas, Gerwani dengan revolusi sosial, dan PNI dengan nasionalisme politik.<sup>41</sup> Dengan demikian, simbol busana dan tarian dalam peringatan Hari Kartini tidak netral, melainkan menjadi arena hegemoni ideologi yang mempengaruhi konstruksi peran perempuan di Surabaya. Namun disisi lain, simbol ini juga membatasi ruang gerak perempuan.

<sup>40</sup> Blackburn, S. (2004). *Women and the state in modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 195

<sup>41</sup> Wieringa, S. E. (1999). *Penghancuran gerakan perempuan: Politik seksual di Indonesia pasca kejatuhan PKI* (hlm. 122-124). Galangpress

Citra perempuan ideal yang dilekatkan pada kebaya atau pakaian adat tidak dapat dilepaskan dari proyek ideologis negara pada masa Demokrasi Terpimpin.<sup>42</sup> Dalam upaya membangun identitas nasional pascakolonial, Soekarno menempatkan perempuan sebagai “penjaga moral bangsa” melalui simbolisasi busana tradisional. Kebaya, yang dipromosikan dalam berbagai perayaan nasional seperti Hari Kartini dan Hari Ibu, menjadi representasi visual dari konsep Ibu Bangsa perempuan yang anggun, sopan, berbakti pada keluarga, dan setia pada revolusi.

Namun, di balik simbol tersebut, terdapat proses politik yang mengekang kebebasan perempuan untuk mengekspresikan diri di luar norma-norma yang telah ditentukan negara. Pakaian tradisional seperti kebaya digunakan bukan hanya sebagai ekspresi budaya, tetapi juga sebagai alat pengendalian moral dan sosial. Padahal, ada Kongres Nasional Gerwani ke-6 tahun 1961, Presiden Soekarno mengatakan *Gerakan wanita yang sejati bukanlah gerakan kaum nyonya atau ladies movement yang hanya berbicara di ruang tamu. Gerakan wanita Indonesia adalah gerakan massa revolusioner yang ikut serta menentukan arah Revolusi Nasional*.<sup>43</sup>

Dalam pidatonya, Soekarno menekankan bahwa kehadiran perempuan di ruang publik harus melebihi batasan rumah tangga. Ia mengajak Gerwani dan organisasi perempuan agar tidak hanya berkegiatan di dalam rumah atau dalam batas-batas kesopanan sosial yang semata, tetapi turut serta dalam perjuangan politik dan pembangunan sosial. Tubuh dan ekspresi perempuan melalui kehadiran mereka di kongres, rapat umum, parade, dan kegiatan kolektif diposisikan sebagai simbol komitmen terhadap revolusi dan identitas bangsa.

Kedua, tarian dan seni pertunjukan membuka ruang baru bagi perempuan Surabaya untuk tampil sebagai aktor budaya dan politik. Dengan tampil di panggung publik, perempuan tidak lagi semata-mata dilihat sebagai penghuni ranah

---

<sup>42</sup> Instruksi Bersama Menteri/Sekretaris Negara/Ketua Panitia Penyelenggaraan Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia dan Pengurus Besar Front Nasional, Tahun 1965.

<sup>43</sup> Bintang Merah Nomor Spesial, "Maju Terus" Jilid I. Kongres Nasional Ke-VII (Luar Biasa) Partai Komunis Indonesia. Yayasan Pembaruan, Jakarta 1963.

domestik, melainkan bagian penting dari wajah kota. Bagi sebagian perempuan muda, kesempatan ini menjadi medium aktualisasi diri: mereka dapat menunjukkan bakat, berpartisipasi dalam acara nasional, sekaligus mengukuhkan posisi perempuan dalam diskursus kebangsaan. Akan tetapi, dampaknya juga berlapis. Seni pertunjukan dalam perayaan Kartini seringkali diarahkan oleh negara atau organisasi perempuan sesuai orientasi ideologi mereka. Misalnya, Muslimat NU menekankan tarian dan busana sebagai simbol religiusitas dan kesalehan, sedangkan Gerwani menafsirkan seni sebagai media kampanye kesetaraan gender dan revolusi sosial.<sup>44</sup> Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi subjek seni, tetapi juga objek dari perebutan makna politik.

Ketiga, simbolisme ini memberi pengaruh jangka panjang pada persepsi masyarakat tentang perempuan. Anak-anak perempuan yang terlibat dalam lomba busana, sepeda hias, atau tarian sejak dini disosialisasikan untuk melihat dirinya sebagai bagian dari proyek kebangsaan. Hal ini menanamkan kesadaran bahwa peran perempuan tidak terbatas pada rumah tangga, tetapi juga mencakup ruang sosial, budaya, bahkan politik. Namun, bersamaan dengan itu, mereka juga diwarisi ekspektasi untuk selalu tampil sebagai representasi moral dan tradisi bangsa.

### 3.3 Perempuan sebagai Subjek dan Objek Simbol di Surabaya

Dalam peringatan Hari Kartini di Surabaya periode 1950-1965, perempuan tampil dalam dua posisi yang seringkali tumpang tindih: sebagai subjek sekaligus objek simbol kebudayaan. Sebagai subjek, perempuan terlibat aktif dalam proses kreatif mereka yang merancang, mengenakan busana adat, menari di panggung, menyanyikan paduan suara, hingga mengorganisasi acara melalui jaringan organisasi perempuan. Sejalan dengan pidato Soekarno di Kongres ke 6 Gerwani pada tahun 1961, Sukarno berkata “Gerakan wanita yang sejati bukanlah gerakan kaum nyonya atau ladies movement yang hanya berbicara di ruang tamu. Gerakan wanita Indonesia adalah gerakan massa revolusioner yang ikut serta menentukan

<sup>44</sup> Wieringa, S. (1999). Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI. Jakarta: hlm 236 Galangpress.

arah Revolusi Nasional.”<sup>45</sup> Dengan demikian, peran perempuan tidak lagi terbatas pada ranah domestik, melainkan meluas ke ranah publik dan politik, di mana tubuh dan ekspresi mereka menjadi medium artikulasi identitas bangsa.

Namun, perempuan juga ditempatkan sebagai objek simbol yang diproduksi oleh negara maupun organisasi perempuan. Tubuh perempuan dijadikan layar untuk memproyeksikan berbagai tafsir ideologi: kebaya dipakai untuk menandai kesopanan dan tradisi; tarian dipakai untuk mengekspresikan nasionalisme atau revolusi sosial; dan kehadiran anak-anak perempuan dalam lomba busana atau sepeda hias diposisikan sebagai simbol generasi penerus cita-cita emansipasi. Dalam posisi ini, perempuan kerap tidak sepenuhnya berdaulat atas makna yang dilekatkan, karena simbolisasi tersebut diarahkan oleh wacana ideologis yang lebih besar.

Kemudian, Susan Blackburn menunjukkan bahwa negara di era Demokrasi Terpimpin sering menjadikan perempuan sebagai alat propaganda politik, terutama dalam perayaan-perayaan nasional.<sup>46</sup> Dalam lanskap politik kebudayaan masa Demokrasi Terpimpin, negara secara aktif membentuk citra perempuan sebagai wajah moral bangsa. Pidato Presiden Soekarno dalam Kongres Gerwani 1961 menjadi titik penting yang menunjukkan konstruksi ideologis tersebut. Ia menegaskan bahwa gerakan wanita Indonesia harus “membela kepentingan rakyat, membela moral bangsa, dan membela tradisi kita sendiri bukan meniru-niru Barat.”<sup>47</sup> Sementara itu, Saskia Wieringa menekankan bagaimana organisasi perempuan seperti Gerwani mencoba melawan konstruksi tersebut dengan menampilkan perempuan bukan hanya sebagai simbol moral, melainkan juga sebagai agen revolusi sosial.<sup>48</sup> Pertarungan simbol ini terlihat jelas di Surabaya, di mana Muslimat NU, Gerwani, dan organisasi perempuan PNI memanfaatkan tubuh perempuan dalam peringatan Hari Kartini untuk mengartikulasikan tafsir ideologis masing-masing.

<sup>45</sup> Bintang Merah Nomor Spesial, "Maju Terus" Jilid I. Kongres Nasional Ke-VII (Luar Biasa) Partai Komunis Indonesia. Yayasan Pembaruan, Jakarta 1963.

<sup>46</sup> Blackburn, S. (2004). *Women and the state in modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 95-100.

<sup>47</sup> Bintang Merah Nomor Spesial, "Maju Terus" Jilid I. Kongres Nasional Ke-VII (Luar Biasa) Partai Komunis Indonesia. Yayasan Pembaruan, Jakarta 1963.

<sup>48</sup> Ibid, Wieringa, S. (1991)

## BAB 4. MAKNA DAN KEPENTINGAN IDEOLOGIS DI BALIK PERINGATAN HARI KARTINI (1950-1965)

Bab ini menjawab rumusan masalah ketiga dengan mengeksplorasi makna politis, ideologis, dan kultural dari simbolisasi Kartini, serta kepentingan negara dan elite perempuan di balik perayaan tersebut.

### 4.1 Kartini dan Politik Identitas Nasional di Surabaya

Sejak awal 1950-an, peringatan Hari Kartini di Surabaya tidak semata menjadi agenda kultural, melainkan juga sarana politik identitas nasional. Figur Kartini dihadirkan sebagai ikon emansipasi perempuan sekaligus simbol modernitas bangsa muda. Dalam perayaan-perayaan resmi, potret besar Kartini kerap menghiasi panggung utama, menegaskan posisinya sebagai figur nasional yang ditempatkan sejajar dengan pahlawan revolusi dan tokoh kebangsaan lainnya.<sup>49</sup>

Contoh konkret terlihat pada karnaval Hari Kartini di Surabaya, 21 April 1953, yang ditemukan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur. Dalam acara tersebut, kontingen perempuan dari sekolah-sekolah dan organisasi tampil mengenakan busana adat dari berbagai daerah. Karnaval ini dipandang bukan sekadar hiburan, melainkan bentuk visualisasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai persatuan nasional. Kartini, dengan kebaya dan citra kesopanannya, menjadi figur pemersatu yang menghadirkan imajinasi tentang bangsa yang berakar pada tradisi namun menuju modernitas. Sebab, republik yang baru berdiri tengah menghadapi krisis integrasi. Pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat dan Aceh menolak legitimasi negara dan mengusung cita-cita negara Islam, sementara di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakkar memimpin pemberontakan yang sama sejak awal 1950-an.<sup>50</sup> Ketegangan semakin meningkat dengan lahirnya PRRI di Sumatra Barat dan Permesta di Sulawesi Utara, yang menandai gejolak

---

<sup>49</sup> ISEAS (2020) *Apropriating Kartini: Colonial, National and Transnational Memories of Indonesian Icon*, hlm 147

<sup>50</sup> Chalid, K. H. Idham, *Islam dan Demokrasi Terpimpin*, Surabaya.

ketidakpuasan daerah terhadap Jakarta. Ancaman perpecahan ini membuat pemerintah pusat merasa perlu menegaskan persatuan nasional dalam berbagai ruang simbolik, termasuk melalui perayaan publik di kota-kota besar.

Di saat yang sama, Indonesia juga berada dalam pusaran pertarungan ideologi. Nasionalis, Islam, dan Komunis saling bersaing untuk mempengaruhi arah bangsa. Perdebatan dasar negara dalam Konstituante 1956 hingga menjelang Dekrit Presiden 1959 memperlihatkan tajamnya perbedaan visi antara Pancasila dan Islam. Sementara itu, PKI, yang mulai bangkit kembali sejak awal 1950-an, berusaha memanfaatkan ruang budaya untuk menyebarkan gagasan revolusioner. Dalam konteks seperti ini, perayaan Kartini dengan menghadirkan busana adat dari seluruh Nusantara dipakai untuk memperlihatkan sebuah narasi kebangsaan yang inklusif bahwa identitas nasional berdiri di atas pluralitas budaya, bukan pada dominasi satu ideologi tunggal.<sup>51</sup> Persaingan antar partai juga memperumit situasi. Pemilu 1955 yang menghadirkan empat kekuatan utama PNI, Masyumi, NU, dan PKI menunjukkan tidak adanya partai dominan. Kabinet silih berganti jatuh bangun, menandakan rapuhnya stabilitas politik. Dalam kondisi ini, simbol-simbol kultural seperti peringatan Kartini menjadi sarana yang relatif netral untuk memelihara semangat persatuan. Surabaya, dengan posisinya sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan yang plural secara etnis, menjadi panggung ideal untuk menyuarakan pesan itu.

Pada dekade 1950- 1960-an, pendidikan untuk kaum perempuan masih menghadapi banyak keterbatasan.<sup>52</sup> Akses sekolah menengah dan perguruan tinggi mulai terbuka, tetapi jumlah perempuan yang melanjutkan pendidikan masih jauh lebih kecil dibanding laki-laki. Banyak keluarga masih memandang peran utama perempuan berada di ranah domestik. Meski demikian, semangat emansipasi yang diwarisi dari Kartini mendorong organisasi-organisasi perempuan di Surabaya untuk memperjuangkan hak pendidikan. Muslimat NU, misalnya, membuka madrasah dan kursus keagamaan bagi anak perempuan, sementara Gerwani

---

<sup>51</sup> Kahin, George MeT., *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca New York 1952, hlm 87

<sup>52</sup> Ibid, Kahin and George

mengorganisasi kursus baca-tulis, menjahit, dan pelatihan kerja bagi kaum buruh perempuan. Organisasi perempuan PNI pun menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam lembaga pendidikan formal sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

Fokus perjuangan perempuan kala itu tidak berhenti pada pendidikan, tetapi juga mencakup isu-isu kesetaraan di ranah kerja, politik, dan hukum keluarga. Demonstrasi perempuan di Surabaya tahun 1956, yang menuntut pengesahan undang-undang perkawinan untuk membatasi poligami, memperlihatkan bahwa perjuangan perempuan bergerak dari sekadar akses pendidikan menuju isu-isu struktural yang mempengaruhi posisi sosial mereka.<sup>53</sup> Pendidikan dipandang sebagai pintu masuk utama untuk memperkuat posisi perempuan dalam Masyarakat modern, sementara isu-isu lain dipandang sebagai konsekuensi logis dari semakin luasnya ruang gerak perempuan di ranah publik.

Konteks ini selaras dengan agenda politik Soekarno di era Demokrasi Terpimpin, yang menekankan pembangunan nasional dan revolusi berkesinambungan. Pendidikan perempuan menjadi bagian dari proyek besar mencetak “manusia Indonesia baru” yang sadar politik, terdidik, dan mampu berkontribusi pada pembangunan.<sup>54</sup> Dengan menjadikan Kartini simbol perjuangan pendidikan, negara berupaya membumikan gagasan bahwa perempuan bukan lagi sekadar pendamping, melainkan agen penting dalam revolusi sosial. Pendidikan perempuan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan kapasitas individu, tetapi juga sebagai investasi untuk memperkuat bangsa dalam menghadapi imperialisme dan kapitalisme global.

Pada akhirnya, pemanfaatan Kartini sebagai simbol politik identitas nasional dapat dibaca sebagai strategi negara untuk menata peran perempuan dalam masyarakat pasca-kemerdekaan. Negara kerap menggunakan figur perempuan dalam perayaan nasional untuk menampilkan citra moralitas dan kesopanan bangsa, tetapi dalam kerangka yang dikendalikan negara. Dengan menempatkan Kartini di

---

<sup>53</sup> Martyn, E. (2004). *The Women's Movement in Postcolonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy*. Hlm 315-317

<sup>54</sup> Robinson, K. (2000). *Indonesian women—from Orde Baru to Reformasi* (hlm. 139-169). Allen & Unwin.

sekolah, balai kota, dan Balai Pemuda, negara berupaya menyatukan narasi emansipasi dengan visi pembangunan nasional.

Namun, simbolisasi Kartini tidak pernah netral. Tafsir atas Kartini juga menjadi arena kontestasi ideologis. Gerwani, misalnya, menolak tafsir Kartini yang domestik, dan sebaliknya menekankan gagasannya tentang pendidikan dan kesetaraan sebagai dasar perjuangan revolusioner. Di sisi lain, Muslimat NU menafsirkan Kartini dalam bingkai religius, menekankan bahwa emansipasi harus berjalan seiring dengan kesalehan moral. Sementara organisasi perempuan PNI memosisikan Kartini sebagai simbol nasionalisme yang sejalan dengan cita-cita revolusi Indonesia. Pertarungan tafsir ini terlihat jelas di Surabaya, kota di mana tiga arus besar organisasi perempuan hidup berdampingan, saling bersaing, dan menggunakan peringatan Kartini sebagai arena legitimasi ideologis.

#### **4.2 Perayaan Hari Kartini sebagai Alat Negara**

Perayaan Hari Kartini pada periode 1950-1965 tidak dapat dilepaskan dari politik kebudayaan negara pasca-kemerdekaan. Negara memanfaatkan simbol Kartini bukan hanya sebagai penghormatan terhadap tokoh perempuan, melainkan juga sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Kartini dijadikan figur nasional yang aman, tidak kontroversial, dan dapat dipakai untuk menyatukan berbagai kelompok ideologi yang saling bersaing di era Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin.<sup>55</sup>

Di Surabaya, praktik ini tampak jelas dalam berbagai kegiatan resmi yang diselenggarakan pemerintah kota bersama organisasi perempuan. Karnaval, lomba busana adat, hingga pementasan drama di Balai Pemuda senantiasa dihadiri oleh pejabat daerah. Kehadiran mereka bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk representasi negara yang mengawal narasi tentang perempuan. Dengan menampilkan Kartini dalam simbol busana kebaya, potret besar di panggung, atau pidato pejabat yang menghubungkannya dengan pembangunan, negara

---

<sup>55</sup>ISEAS (2020) *Appropriating Kartini: Colonial, National and Transnational Memories of Indonesian Icon*, hlm 93.

mengarahkan interpretasi Kartini pada kerangka moralitas, kesopanan, dan nasionalisme.

Dalam konteks politik nasional, pemaknaan ini sangat strategis. Pada era Demokrasi Liberal (1950-1959), perayaan Kartini berfungsi sebagai ruang untuk menyalurkan gagasan persatuan di tengah rivalitas antarpantai.<sup>56</sup> Kartini diproyeksikan sebagai sosok pemersatu, yang mampu menenangkan ketegangan antara kubu nasionalis, Islam, dan komunis. Sementara pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Soekarno mengaitkan Kartini dengan agenda revolusi berkesinambungan. Pidato resmi sering menekankan bahwa semangat Kartini bukan hanya emansipasi perempuan, melainkan juga perjuangan membangun bangsa yang adil dan makmur di bawah kepemimpinan revolusioner.

Jika dilihat dari kacamata feminisme Judith Butler, khususnya gagasan tentang gender performativity, Judith mengutip: *There is some existing identity, understood through the category of woman, who not only initiate feminist interest and goals within discourse but constitutes the subject for whom political representation is pursued.*<sup>57</sup> Perayaan Hari Kartini di Surabaya pada periode 1950-1965 bukan sekadar ritual budaya, melainkan praktik performatif yang membentuk dan menormalisasi identitas perempuan sesuai kebutuhan negara. Tubuh perempuan, busana kebaya, tarian, dan simbol Kartini tidak hanya merepresentasikan sesuatu yang sudah ada, tetapi justru menciptakan realitas tentang apa artinya menjadi perempuan Indonesia yang ideal.

Kemudian Judith Butler juga menegaskan, *in such cas, uncritical appeal to such a system for the emancipation of woman will be clearly self defeating*<sup>58</sup> Identitas perempuan dalam perayaan Kartini diproduksi melalui pengulangan simbolik seperti kebaya, tarian, paduan suara, dan lomba busana. Tindakan-tindakan ini menciptakan kesan bahwa perempuan Indonesia secara alamiah anggun, religius, dan berakar pada tradisi, padahal identitas itu sesungguhnya konstruksi politik dan kultural.

---

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, hlm 32

<sup>58</sup> Ibid, Butler, hlm 33

Butler juga mengingatkan bahwa tubuh *adalah a surface whose permeability is politically regulated*.<sup>59</sup> Tubuh perempuan dalam perayaan Kartini tidak hanya hadir secara fisik, melainkan menjadi teks yang ditulis ulang oleh ideologi negara. Potret besar Kartini yang menghiasi panggung pementasan tari di Balai Pemuda Surabaya, atau keterlibatan anak-anak perempuan dalam lomba busana adat, merupakan mekanisme simbolik untuk mendisiplinkan sekaligus mereproduksi citra perempuan ideal yang dibutuhkan rezim Demokrasi Terpimpin.

Dalam konteks perayaan Kartini di Surabaya, relasi kuasa antara negara dan organisasi perempuan tampak jelas dalam bagaimana simbol-simbol kebudayaan dimaknai dan diarahkan. Negara, melalui aparat birokrasi maupun lembaga pendidikan, berusaha menampilkan Kartini sebagai figur nasional yang sesuai dengan visi pembangunan dan revolusi ala Soekarno.<sup>60</sup> Kartini diposisikan sebagai ibu bangsa yang anggun, sopan, religius, dan sekaligus modern. Narasi ini diperkuat dalam pidato-pidato resmi, pemasangan potret besar Kartini di panggung perayaan, serta aturan mengenai busana adat yang wajib dikenakan oleh perempuan dalam karnaval atau lomba.

Namun, organisasi perempuan di Surabaya tidak sepenuhnya pasif. Mereka ikut menegosiasikan makna simbol Kartini sesuai dengan orientasi ideologinya.<sup>61</sup> Muslimat NU, misalnya, menerima kerangka negara tentang perempuan sebagai penjaga moral, tetapi menambahkan penekanan religius sehingga Kartini dibaca sebagai teladan perempuan salehah. Sebaliknya, Gerwani menantang tafsir negara yang terlalu domestik dan moralistik. Melalui pementasan tari, kursus literasi, hingga orasi politik, Gerwani menampilkan Kartini sebagai simbol perjuangan kelas dan emansipasi radikal. Sementara itu, organisasi perempuan PNI berada di jalur tengah: mereka menerima Kartini sebagai simbol nasionalisme, tetapi menekankannya dalam kerangka politik pembangunan nasional dan kesetiaan pada ideologi PNI.

<sup>59</sup> Ibid, Butler hlm 32

<sup>60</sup> D. Rahmanudin. (2023). "Gerwani Sect Soekarno Era Islamic Politics." Dalam *Proceedings of the 5th International Graduate Conference in Islam and Interdisciplinary Studies (IGCIIS 2022), 19-20 October 2022, Mataram, Lombok, Indonesia*. EAI Publisher. <https://doi.org/10.4108/eai.19-10-2022.2331878>.

<sup>61</sup> Coté, J. (1998). *The Correspondence of Kartini's Sisters: Annotations on the Indonesian Nationalist Movement, 1905-1925*. Archipel-Etudes Interdisciplinaires Sur Le Monde Indonésien, 55(55), 61-82.

Jika dibaca dengan teori Judith Butler, praktik semacam ini memperlihatkan bagaimana performativitas gender selalu berada dalam lingkaran kuasa. Butler menulis *his anti foundationalist approach to coalitional politics assumes neither that "identity" is a premise nor that the shape or meaning of a coalitional assemblage can be known prior to its achievement. Because the articulation of an identity within available cultural terms in states a definition that forecloses in advance the emergence of new identity concepts in and through politically engaged actions, the foundationalist tactic cannot take the transformation or expansion of existing identity concepts as a normative goal.*<sup>62</sup> Dengan kata lain, identitas perempuan dalam perayaan Kartini dihasilkan dari repetisi ritual simbolis yang diarahkan oleh negara, tetapi dalam proses itu selalu ada ruang negosiasi oleh organisasi perempuan.

Relasi kuasa ini juga tampak dalam cara negara mengakomodasi atau menolak bentuk ekspresi tertentu. Pementasan tari tradisional dengan kostum sopan lebih mudah diterima karena sesuai dengan norma moral negara, sementara kampanye Gerwani tentang kesetaraan politik perempuan sering dicurigai sebagai radikal. Perbedaan penerimaan ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan dalam perayaan Kartini tidak pernah netral; ia adalah arena di mana ideologi negara dan organisasi perempuan bertemu, bertarung, dan saling membatasi. Dengan demikian, makna dan kepentingan ideologis di balik simbolisasi Kartini terletak pada bagaimana negara berupaya mempertahankan hegemoni politik melalui ritual budaya, sekaligus bagaimana organisasi perempuan merespons, bernegosiasi, dan bahkan menantangnya. Perayaan Kartini di Surabaya menjadi bukti bahwa simbol kebudayaan dapat berfungsi ganda: sebagai alat kekuasaan negara sekaligus sebagai ruang perlawanan dan artikulasi ideologi alternatif.

---

<sup>62</sup> Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (New York: Routledge, 1990), hlm 4

### 4.3 Pertarungan Makna Kartini antar Kelompok Sosial

Dalam konteks ini, makna Kartini tidak pernah tunggal, melainkan lahir dari tarik-menarik antara negara, organisasi perempuan, serta masyarakat luas yang menghidupi tradisi perayaan tersebut.<sup>63</sup> Negara berusaha menampilkan Kartini sebagai simbol yang aman, serba netral, dan sesuai dengan visi pembangunan nasional. Kartini diposisikan sebagai “ibu bangsa” yang anggun, bermoral, dan berakar pada tradisi. Namun, simbol ini tidak diterima begitu saja oleh seluruh kelompok. Organisasi perempuan seperti Muslimat NU, Gerwani, dan organisasi perempuan PNI mengajukan tafsir alternatif yang berakar pada ideologi masing-masing.

Muslimat NU cenderung menekankan Kartini sebagai teladan perempuan salehah karena Kartini merupakan santri dari KH. Soleh Darat. Sedangkan, dalam perayaan, mereka menambahkan nuansa religius yang menghubungkan perjuangan Kartini dengan peran perempuan sebagai penjaga akhlak dan moral keluarga. Narasi ini menegaskan domestikasi peran perempuan, tetapi dengan legitimasi keagamaan yang memperkuat posisi mereka dalam wacana publik. Sebaliknya, Gerwani menantang tafsir negara yang terlalu domestik dan moralistik.<sup>64</sup> Melalui pementasan tari, kursus literasi, hingga orasi politik, mereka menampilkan Kartini sebagai simbol emansipasi radikal dan perjuangan kelas. Kartini dibaca bukan hanya sebagai tokoh moral, tetapi sebagai inspirasi bagi perjuangan perempuan untuk terlibat aktif dalam politik, ekonomi, dan revolusi. Tafsir ini berseberangan dengan konstruksi negara karena menolak pembatasan perempuan hanya pada ranah kesopanan dan keluarga.

Sementara itu, organisasi perempuan PNI menempati posisi di jalur tengah. Mereka menerima Kartini sebagai simbol nasionalisme, tetapi menekankannya

---

<sup>63</sup>Vreede-de Stuers, Cora. "Kartini: feiten en ficties" [Kartini: facts and fictions]. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 121, no. 2 (1965): 233-44

<sup>64</sup> Blackburn, S. (2004). *Women and the state in modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 15-2

dalam kerangka politik pembangunan nasional dan kesetiaan pada ideologi partai.<sup>65</sup> Dengan demikian, tafsir PNI berfungsi sebagai jembatan antara wacana negara dan kebutuhan politik partai, meneguhkan Kartini sebagai ikon perempuan nasionalis yang setia pada perjuangan bangsa.

Pertarungan makna ini memperlihatkan bahwa Kartini merupakan simbol yang cair, bisa diperebutkan, dan dimaknai ulang sesuai konteks.<sup>58</sup> Negara berusaha mendisiplinkan simbol Kartini melalui regulasi busana, tata perayaan, dan pidato pejabat, tetapi organisasi perempuan justru menggunakan ruang perayaan untuk menegosiasikan atau bahkan menantang makna resmi. Dengan demikian, perayaan Hari Kartini di Surabaya bukan hanya peristiwa budaya, tetapi juga medan hegemoni dan kontra-hegemoni di mana makna tentang perempuan, moralitas, dan nasionalisme diproduksi, disebar, dan diperebutkan.

Tabel 4.1 Perbedaan Tafsir Hari Kartini di Tiga Organisasi Perempuan

Organisasi Perempuan	Orientasi Ideologi	Strategi Negosiasi	Representasi Kartini	Hubungan dengan Negara
<u>Gerwani</u>	Sosialis-revolusioner, dekat dengan PKI	Perlawanan simbolik terhadap <u>domestifikasi</u> perempuan	Kartini dipandang sebagai simbol emansipasi radikal, pejuang kelas, dan pembebasan perempuan	Berseberangan dengan tafsir resmi negara; mengalami <u>stigmatisasi</u> dan represi pasca-1965
Wanita Marhaen / Organisasi Perempuan PNI	Nasionalis moderat	<u>Moderasi</u> dan akomodasi terhadap ideologi negara	Kartini direpresentasikan sebagai simbol nasionalisme, modernitas, dan pembangunan bangsa	Cenderung akomodatif serta menyesuaikan tafsir Kartini dengan agenda pembangunan negara
Muslimat NU	<u>Religius-tradisionalis</u>	Adaptasi nilai Kartini dengan ajaran Islam dan budaya lokal	Kartini dipandang sebagai perempuan anggun, religius, berpendidikan, dan "ibu bangsa"	Dekat dengan tafsir negara serta memperoleh legitimasi moral dan sosial
Aisyiyah	<u>Modernis Islam</u>	Mengintegrasikan pendidikan perempuan dengan pembaruan Islam	Kartini direpresentasikan sebagai perempuan terdidik yang mendorong kemajuan umat	Relatif harmonis dengan negara melalui jalur pendidikan dan dakwah sosial
Kowani (Kongres)	Nasionalis-organisatoris	Menjadi mediator berbagai	Kartini dipahami sebagai simbol	Memiliki hubungan erat

Organisasi Perempuan	Orientasi Ideologi	Strategi Negosiasi	Representasi Kartini	Hubungan dengan Negara
Wanita Indonesia)		kepentingan organisasi perempuan	persatuan gerakan perempuan Indonesia	dengan negara sebagai mitra dalam agenda nasional perempuan
PKK	<u>Nasionalis-developmental</u>	Menyesuaikan peran perempuan dengan program pembangunan Orde Baru	Kartini direpresentasikan sebagai “ibu pembangunan” dan pendamping suami	Sangat dekat dengan negara; menjadi instrumen sosial kebijakan pembangunan keluarga
Dharma Wanita	<u>Birokratis-state oriented</u>	Menempatkan perempuan dalam struktur pendamping aparaturnegara	Kartini dimaknai sebagai simbol kesetiaan, pengabdian, dan ketertiban keluarga	Menjadi bagian langsung dari sistem birokrasi negara
Fatayat NU	Religius-progresif	Menggabungkan nilai keislaman dengan isu pemberdayaan perempuan muda	Kartini dipandang sebagai simbol pendidikan, kesadaran sosial, dan kemandirian perempuan	Bersifat kooperatif tetapi tetap kritis terhadap isu ketimpangan sosial
Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia)	Nasionalis	Menekankan patriotisme dan partisipasi perempuan dalam negara	Kartini direpresentasikan sebagai simbol perjuangan perempuan dalam kebangsaan	Dekat dengan proyek nasionalisme negara pasca-kemerdekaan

## V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran untuk kajian lebih lanjut.

### 5.1. Kesimpulan

Kajian mengenai peringatan Hari Kartini di Surabaya pada periode 1950-1965 memperlihatkan bahwa perayaan ini tidak sekadar peristiwa kultural tahunan, melainkan sebuah ruang simbolik yang kompleks, tempat ideologi, politik, dan budaya saling bertemu. Surabaya, dengan posisinya sebagai kota pelabuhan terbesar di Jawa Timur sekaligus kota yang sarat dengan memori heroisme 10 November 1945, menyediakan panggung ideal bagi konstruksi makna kebangsaan pasca-kemerdekaan. Dalam ruang inilah, simbol Kartini dikorelasikan dengan narasi persatuan nasional, pembangunan, dan emansipasi perempuan.

Dari rumusan masalah pertama, terlihat bahwa konteks historis Surabaya pasca-kemerdekaan membentuk cara masyarakat dan organisasi perempuan memaknai Kartini. Kota ini menjadi pusat politik, pendidikan, dan perdagangan yang membuka peluang baru bagi perempuan untuk tampil di ruang publik. Perubahan sosial ini menandai pergeseran posisi perempuan dari ranah domestik menuju arena sosial dan politik yang lebih luas.

Rumusan masalah kedua menyingkap bagaimana konstruksi simbol kebudayaan perempuan berlangsung dalam perayaan Hari Kartini. Busana adat, tarian tradisional, paduan suara, hingga lomba anak-anak bukan sekadar hiburan, tetapi instrumen representasi yang memuat makna ganda. Busana tradisional seperti kebaya dan batik meneguhkan citra perempuan sebagai penjaga tradisi dan moralitas, sementara tarian di ruang publik menghubungkan semangat emansipasi dengan nasionalisme. Simbol-simbol ini dimaknai berbeda oleh organisasi perempuan: Muslimat NU menekankan nilai religius, Gerwani menyoroti kesetaraan sosial dan revolusi, sedangkan organisasi perempuan PNI mengaitkannya dengan pembangunan nasional ala Soekarno.

Sementara itu, rumusan masalah ketiga menegaskan bahwa perayaan Hari Kartini juga merupakan arena politik yang sarat kepentingan. Negara, melalui kerangka Demokrasi Terpimpin, memanfaatkan Kartini sebagai alat untuk memobilisasi citra perempuan ideal: anggun, sopan, berakar budaya, sekaligus mendukung pembangunan. Namun, organisasi perempuan tidak hanya menjadi pengikut pasif. Mereka menegosiasikan makna Kartini sesuai dengan orientasi ideologi masing-masing. Dalam kerangka teori Clifford Geertz, perayaan ini dapat dibaca sebagai “teks budaya” yang menampilkan ethos masyarakat Surabaya sekaligus *worldview* bangsa muda. Sedangkan dalam perspektif Judith Butler, tubuh perempuan dalam perayaan Kartini merupakan arena performativitas gender yang dikontrol, diproduksi, dan sekaligus dinegosiasikan oleh kekuasaan negara maupun organisasi perempuan.

Oleh sebab itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peringatan Hari Kartini di Surabaya antara 1950 hingga 1965 tidak hanya berfungsi sebagai ritual kultural, melainkan juga sebagai instrumen politik dan ideologis. Ia menjadi wadah dimana simbol kebudayaan perempuan diproduksi, dipertarungkan, dan dipolitisasi. Perempuan tampil sebagai subjek aktif sekaligus objek simbolis: mereka hadir di panggung perayaan, menampilkan busana dan tarian, namun makna yang dilekatkan pada tubuh mereka sering diarahkan oleh wacana ideologi negara maupun organisasi. Dari sini dapat dipahami bahwa Hari Kartini di Surabaya adalah cermin dari pergulatan lebih luas tentang identitas bangsa, posisi perempuan, dan relasi kuasa di Indonesia pasca-kemerdekaan.

## 5.2. Saran

Pertama, penelitian lebih lanjut perlu memperluas kajian ke daerah lain untuk melihat variasi tafsir Kartini di luar Surabaya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai politik simbol perempuan di Indonesia. Kedua, perlu dilakukan penggalian arsip visual dan kesaksian lisan secara lebih mendalam agar dimensi performativitas dapat dianalisis secara lebih komprehensif. Ketiga, penting bagi pendidikan dan kebijakan budaya masa kini untuk menempatkan Kartini tidak sekadar sebagai ikon simbolik, tetapi sebagai pemikir progresif yang

relevan bagi perjuangan kesetaraan gender kontemporer. Dengan cara ini, peringatan Hari Kartini dapat dihidupkan kembali sebagai momentum reflektif, bukan sekadar ritual seremonial.



## DAFTAR PUSTAKA

- M. S. Anwar, & S. B. Astuti. (2017). Heroisme di Kota Surabaya dalam puisi Indonesia pascakolonial. *Atavisme*, 20(2), 181-196. <https://doi.org/10.24257/ATAVISME.V20I2.383.181-196>
- M. Arnez. (2010). Empowering women through Islam: Fatayat NU between tradition and change. *Journal of Islamic Studies*, 21(1), 59-88. <https://doi.org/10.1093/JIS/ETP025>
- R. Asmarani. (2017). Perempuan dalam perspektif kebudayaan. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 12(1), 7-16. <https://doi.org/10.14710/SABDA.V12I1.15249>
- M. Amini. (2021). *Sejarah organisasi perempuan Indonesia (1928-1998)*. Gadjah Mada University Press.
- P. Basundoro. (2012). Problem pemukiman pascarevolusi kemerdekaan: Studi tentang pemukiman liar di Kota Surabaya 1945-1960. *Humaniora*, 16(3), 346-357. <https://doi.org/10.22146/JH.V16I3.1314>
- S. Blackburn. (2004). *Women and the state in modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Bintang Merah. (1963). *Nomor spesial "Maju Terus" jilid I: Kongres Nasional ke-VII (Luar Biasa) Partai Komunis Indonesia*. Yayasan Pembaruan.
- J. Coté. (1998). The correspondence of Kartini's sisters: Annotations on the Indonesian nationalist movement, 1905-1925. *Archipel*, 55, 61-82.
- D. Crane., et al. (2004). Personalisation and identity in fashion. *Journal of Fashion Marketing*.
- R. Damayanti. (2006). Planning issue and problem in Surabaya, Indonesia. *Journal of Architecture and Built Environment*, 34(1), 40-43. <https://doi.org/10.9744/DIMENSI.34.1.PP>
- H. Dick. (2003). *Surabaya, city of work: A socioeconomic history, 1900-2000*. Singapore University Press.
- C. Geertz. (1973). *Tafsir kebudayaan*. Kanisius.
- S. Hartono., & Handinoto. (2007). Surabaya Kota Pelabuhan (Surabaya Port City): Studi tentang perkembangan bentuk dan struktur sebuah kota pelabuhan ditinjau dari perkembangan transportasi akibat situasi politik dan ekonomi dari abad 13 sampai awal abad 21. *Dimensi Teknik Arsitektur*, 35(1), 88-99. <https://doi.org/10.9744/DIMENSI.35.1.hlm.88-99>
- A. A. G. A. Indrawan, Sariyatun, & S. Ediyono. (2023). Tugu Pahlawan sebagai simbol perjuangan Arek Suroboyo dan urgensinya dalam penguatan pendidikan karakter di era budaya global. *Science, Engineering, Education, and Development Studies (SEEDS)*, 6(1). <https://doi.org/10.20961/seeds.v6i1.72385>
- ICEAS. (2020). *Appropriating Kartini: Colonial, national and transnational memories of Indonesian icon*.
- G. McT. Kahin. (1952). *Nationalism and revolution in Indonesia*. Cornell

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964. (1964). <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/13148/kp1081964.pdf>
- Christine Claudia Lukman, Yasraf A. Piliang, & Priyanto Sunarto. (2013). Kebaya Encim as the phenomenon of mimicry in East Indies Dutch colonial's culture. *Arts and Design Studies*, 13, 15-22.
- P. Mahy. (2012). Being Kartini: Ceremony and print media in the commemoration of Indonesia's first feminist. *Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context*, 28, 1-11.
- E. Martyn. (2004). *The women's movement in postcolonial Indonesia: Gender and nation in a new democracy*.
- P. B. Paty. (2023). R. A. Kartini and the many faces of colonial female subject. Dalam *Routledge eBooks* (hlm. 143-157). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003270102-15>
- J. Porra, R. Hirschheim, & M. S. Parks. (2014). The historical research method and information systems research. *Journal of the Association for Information Systems*, 15(9).
- H. S. A. Putra. (2001). Remembering, misremembering and forgetting: The struggle over "Serangan Oemoem 1 Maret 1949" in Yogyakarta, Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 29(3), 471-494. <https://doi.org/10.1163/156853101X00208>
- S. M. Purwaningsih, L. Muchoiyaroh, & J. Biringan. (2018). Kartini and the feminism thinking in Javanese nobles women (women priyayi). *Proceedings of the International Conference on Social Sciences*, 49. <https://doi.org/10.2991/ICSS-18.2018.12>
- D. Rahmanudin. (2023). Gerwani sect Soekarno era Islamic politics. Dalam *Proceedings of the 5th International Graduate Conference in Islam and Interdisciplinary Studies (IGCIIS 2022)*. EAI Publisher. <https://doi.org/10.4108/eai.19-10-2022.2331878>
- K. Robinson. (2000). *Indonesian women: From Orde Baru to Reformasi*. Allen & Unwin.
- D. Rutherford. (1993). Unpacking a national heroine: Two Kartinis and their people. *Indonesia*, 55, 23-44. <https://doi.org/10.2307/3351085>
- A. Sachari, A. Haldani, & Y. Y. Sunarya. (2018). Identity shift on traditional clothes for women in Tuban, East Java, Indonesia. Dalam *Proceedings of the 3rd International Conference on Creative Media, Design and Technology (REKA 2017)*, 4, 252-256. <https://doi.org/10.2991/BCM-17.2018.48>
- L. C. Sebastian, & S. H. B. O. Alkaff. (2024). Ideologies and their importance in shaping Islam, Muslims, and activism in Indonesia. Dalam *Springer International Publishing* (hlm. 71-131). [https://doi.org/10.1007/978-981-97-1140-6\\_3](https://doi.org/10.1007/978-981-97-1140-6_3)
- Cora Vreede-de Stuers. (1965). Kartini: feiten en ficties [Kartini: Facts and fictions]. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 121(2), 233-244.
- S. E. Wieringa. (1999). *Penghancuran gerakan perempuan: Politik seksual di Indonesia pasca kejatuhan PKI*. Galang Press.
- Bintang Merah. (1963). *Nomor spesial "Maju Terus" Jilid I: Kongres Nasional ke-VII PKI*. Yayasan Pembaruan.
- Soerabaijasch Handelsblad. (1929, April 3). *Een herdenking*.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Acara karnaval pada peringatan hari kartini di Surabaya, 21 - 4 - 1953, <https://sikn.jatimprov.go.id/index.php/acara-karnaval-pada-peringatan-hari-kartini-di-surabaya-21-4-1953> Sebuah pop singer yang tampil dengan semua personil wanita pada peringatan Hari Kartini di Balai Pemuda Surabaya, 21 - 4 - 1960 <https://sikn.jatimprov.go.id/index.php/sebuah-pop-singer-yang-tampil-dengan-semua-personil-wanita-pada-peringatan-hari-kartini-di-balai-pemuda-surabaya-21-4-1960>



Hiburan anak-anak sekolah pada acara peringatan hari kartini di surabaya, 21 - 4 - 1953 <https://sikn.jatimprov.go.id/index.php/tari-janger-bali-yang-dibawakan-oleh-anak-anak-sekolah-pada-acara-peringatan-hari-kartini-di-surabaya-21-4-1953> Sebuah drama yang ditampilkan pada peringatan Hari Kartini di Balai

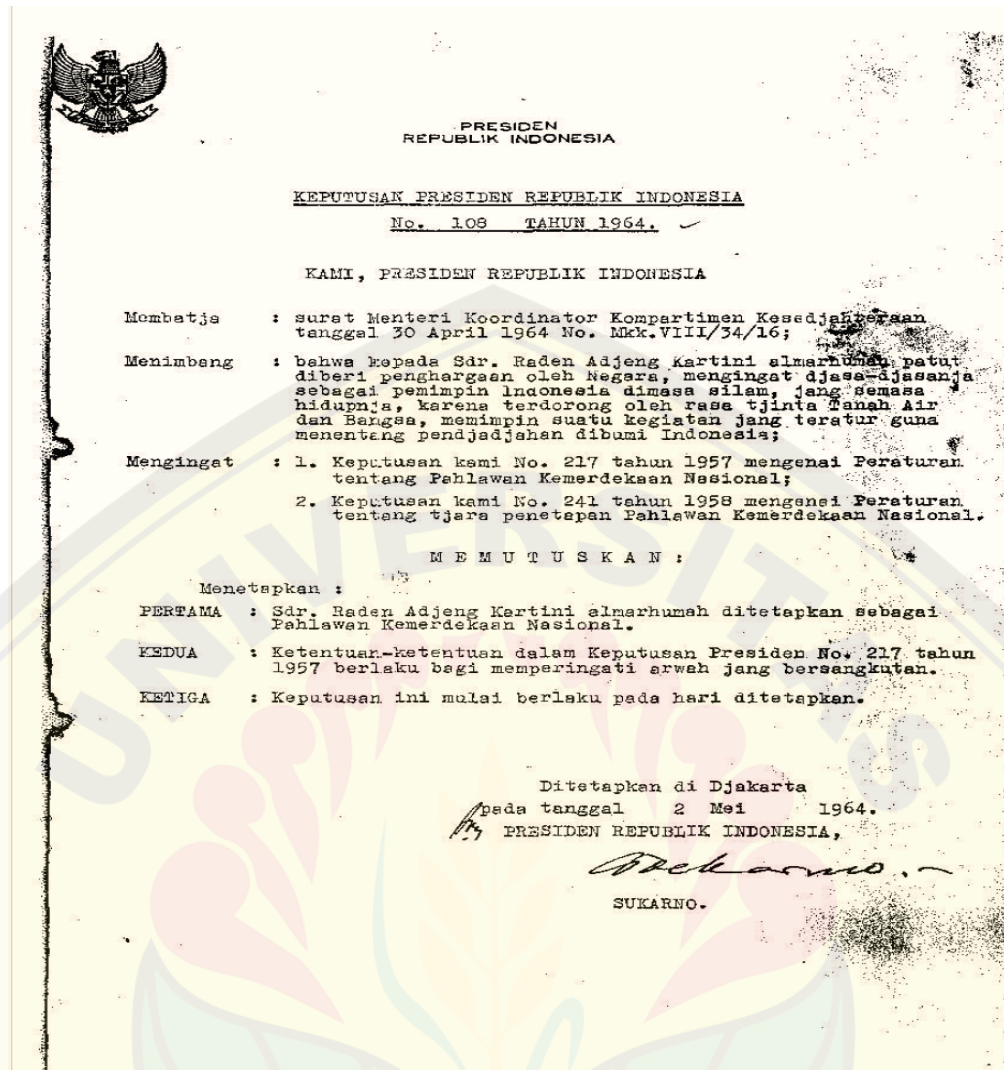
Pemuda Surabaya, 21 - 4 - 1960 <https://sikn.jatimprov.go.id/index.php/sebuah-drama-yang-ditampilkan-pada-peringatan-hari-kartini-di-balai-pemuda-surabaya-21-4-1960>



Suasana peringatan hari kartini, 21 - 4 - 1955

<https://sikn.jatimprov.go.id/index.php/suasana-peringatan-hari-kartini-21-4-1961>





Surat Keppres tentang R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional  
jdih.setkab.go.id



Rangkaian Kegiatan Hari Kartini Hiburan Anak dan Arena Bermain: Peringatan Hari Kartini di Surabaya. 21 April 1957. Lomba menghias makanan, Peringatan Hari Kartini di Surabaya. 21 April 1957. Arena bermain anak-anak, Lomba Anak – anak berpakaian profesi berpakaian kelinci, Peringatan Hari Kartini di Surabaya. 21 April 1957. Lomba sepeda hias Anak – anak, Peringatan Hari Kartini di Surabaya. 21 April 1957. Anak – anak berpakaian profesi, Peringatan Hari Kartini di Surabaya. 21 April 1957. Lomba Anak – anak berpakaian profesi berpakaian penjual sate madura.



Ragam Seni dan Pertunjukan di Hari Kartini: Tari-tarian janger surabaya yang dibawakan oleh anak-anak sekolah pada acara peringatan hari kartini di surabaya, 21 - 4 - 1953, Seperangkian gamelan sedang dimaikan oleh para NIYAGA pada peringatan hari kartini di Surabaya, 21 - 4 -

1953, Pertunjukan wayang Potehy, Peringatan Hari Kartini di Surabaya. 21 April 1957, Pameran kerajinan tangan dalam peringatan hari kartini di Surabaya, 21 - 4 - 1953, Pameran lukisan dalam peringatan hari kartini di Surabaya, 21 - 4 - 1953

Saudara-saudara sekalian,

Benar apa jang dikatakan oleh Saudara Umi, bahwa saja sedang sibuk sesibuk-sibuknja. Tetapi saja perlukan datang di Kongres Gerwani ini, oleh karena saja mengetahui bahwa Gerwani adalah salah satu kekuatan untuk mentjapai tjita-tjita kita sekalian.

Saudara Umi tadi menjebutkan beberapa perkataan jang amat mendjadi perhatian kita sekalian. Ada perkataan "Ladies' Movement", gerakan nDoro Den Aju-nDoro Den Aju. Beliau tidak menjinggung hal memuntjaknja harga beras dan gula. Dan memang kalau hal jang demikian itu harus kita kupas, agar supaja perdjongan kita untuk memenuhi Amanat Penderitaan Rakjat, perdjongan kita untuk menjelesaikan Revolusi Nasional kita, perdjongan kita untuk mendirikan suatu masjarakat jang adil dan makmur, tidak terhambat oleh karenanja.

Tetapi tahun jang lalu saja berpidato disini dihadapan Kongres Wanita Indonesia dan disitupun sudah saja sinjalir adanja "Ladies' Movement" dalam gerakan wanita di Indonesia. Dan pada waktu itu saja kupas sedapat-dapatnja dan saja utjapkan harapan, agar supaja gerakan wanita Indonesia djanganlah bersifat "Ladies' Movement", djangan bersifat gerakan para nDoro Den Aju-nDoro Den Aju, tetapi hendaknja bersifat gerakan massa, gerakan massa wanita jang revolusioner dan radikal. Oleh karena memang sebagai saja katakan, pada waktu itu tudjuan revolusi kita, baik tudjuan politis, maupun tudjuan ekonomis, maupun tudjuan sosial, tak dapat ditjapai dengan djalan "Ladies' Movement".

Pidato Soekarno di Kongres Gerwani 1961